

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP TUGAS DAN KEWENANGAN
KPU DALAM MEMVERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
2019 DI INDONESIA**

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah**



Oleh:

RIZKI KHAIRUL

NPM. 1421020217

Program Studi : Siyasah Syar'iyah (Hukum Tata Negara)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1440 H/2018 M**

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP TUGAS DAN KEWENANGAN
KPU DALAM MEMVERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
2019 DI INDONESIA**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

RIZKI KHAIRUL

NPM. 1421020217

Program Studi : Siyasah Syar'iyah (Hukum Tata Negara)

Pembimbing I : Dr. EFA RODIAH NUR, M.H.

Pembimbing II : ETI KARINI , S.H., M.Hum.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1440 H / 2018 M**

ABSTRAK
TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP TUGAS DAN KEWENANGAN
KPU DALAM MEMVERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
2019 DI INDONESIA

Oleh
Rizki Khairul
1421020217

Dalam Al-Qur'an manusia diperintahkan untuk berbuat adil di antara sesama dan di dalam menetapkan keputusan, terutama KPU sebagai lembaga yang punya kewenangan untuk melakukan verifikasi dan menetapkan partai politik peserta pemilu untuk berbuat adil hukumnya wajib, proses verifikasi partai politik peserta pemilu yang dilakukan oleh KPU harus berpedoman pada prinsip-prinsip keadilan, kesamaan di hadapan hukum dan bersih dari praktek *money politic*, konsep *ahl al-halli wa al-aqdi* yang diidentikkan dengan DPR (Dewan Legislatif) dalam sejarah pemerintahan Islam memiliki tugas sebagai lembaga perwakilan yang menampung orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan profesi. Merekalah yang antara lain bertugas menetapkan dan mengangkat kepala negara sebagai pemimpin pemerintahan

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengenai bagaimanakah tugas dan kewenangan KPU dalam melakukan verifikasi partai politik peserta Pemilu di Indonesia, bagaimanakah tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Tugas dan Kewenangan KPU dalam memverifikasi partai politik peserta pemilu di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pandangan fiqh siyasah terhadap tugas dan kewenangan KPU dalam melakukan verifikasi partai politik peserta pemilu di Indonesia sekaligus menganalisis mengenai lembaga yang memiliki tugas dan kewenangan yang sesuai dengan KPU dalam sejarah pemerintahan Islam yang ada pada masa nabi Muhammad dan al-Khulafaurrasyidin, yang menjadi referensi umat Islam untuk mendirikan negara Islam atau khlifah Islamiyah pada saat ini.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan *library research* yang bertujuan menganalisa tugas dan kewenangan KPU dalam melakukan verifikasi partai politik peserta pemilu di Indonesia dan juga tinjauan fiqh Siyasah sehingga skripsi ini bersifat deskriptif analitis menghimpun dan mendeskripsikan data-data yang berupa undang-undang tentang Pemilu, Peraturan KPU, buku-buku dan literatur yang sesuai dengan objek yang dibahas.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan verifikasi terhadap partai politik peserta pemilu di Indonesia dan verifikasi terhadap calon presiden dan wakil presiden tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan fiqh siyasah bahwa untuk mengetahui orang-orang yang layak untuk menjadi pemimpin harus ada proses seleksi atau verifikasi yang dilakukan oleh sebuah lembaga yang independent. Islam juga mengajarkan musyawarah sebagai media pengambilan keputusan bersama selain itu ajaran tentang keadilan yang harus ditegakkan tanpa memandang status sosial dan latarbelakang seseorang.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. H. Endro Suratmin, Sukarama, Bandar Lampung, 35313, Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul : TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP
TUGAS DAN KEWENANGAN KPU DALAM
MEMVERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILU 2019 DI INDONESIA**

**Nama : Rizki Khairul
NPM : 1421020217
Jurusan : Siyasah Syar'iyah
Fakultas : Syari'ah**

MENYETUJUI

**Untuk di munaqasahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqasah Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

**Dr. Efa Rodjah Nur, M.H
NIP. 196908081993032002**

Pembimbing II

**Eti Karini, S.H., M.Hum.
NIP. 197308162003122003**

Ketua Jurusan

**Drs. Susiadi AS, M.Sos.I
NIP. 195808171993031002**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. H. Endro Suratmin, Sukarama, Bandar Lampung, 35313, Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Tugas dan Kewenangan KPU dalam Memverifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2019 di Indonesia** oleh **Rizki Khairul NPM 1421020217** Jurusan **Siyasah Syar'iyah**, telah di ujikan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Jum'at, 13 Juli 2018**

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Drs. Susiadi A.S., M. Sos.I.

Sekretaris : Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I.

Penguji I : Drs. Henry Iwansyah, M.A.

Penguji II : Eti Karini, S.H., M.Hum.

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung**



**Dr. Adamsyah, S.Ag., M.Ag.
NIP.197009011997031002**

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (QS. An-Nisa : 58)¹



¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 128

PERSEMBAHAN

Dengan segala Kebahagiaan, kaya tulis ini saya persembahkan untuk orang-orang yang selalu mendukung terselesaikanya karya ini, diantaranya :

1. Ayahanda Chairul Manzil dan Ibunda Elia Isda yang telah banyak berjuang dan mendo'akan untuk keberhasilanku, terimakasih untuk untaian do'a yang mengiringi setiap langkahku, ku sadari pengorbanan kalian tidak akan terbalas, yang senantiasa mencurahkan kasih sayangnya untukku serta menuntunku dalam menentukan jalan hidupku yang Insha Allah selalu diridhoi-Nya, yang bersusah payah bekerja tanpa mengeluh demi masa depan ku.
2. Kedua kakakku tercinta Vina Rahmawati dan Abdul Rauf, dan kedua adikku tersayang Zikri Khairul dan Mar Atus Shaliha, serta keluarga besarku yang selalu mendoa'kan dan memberi semangat dalam penulisan karya tulis ini.
3. Sahabat-sahabatku di Siyasah Syar'iyah khususnya HTN (D) dan KKN 97 BUMI RESTU Kec.Palas Kalianda yang selalu memberi dukungan dan motivasi.

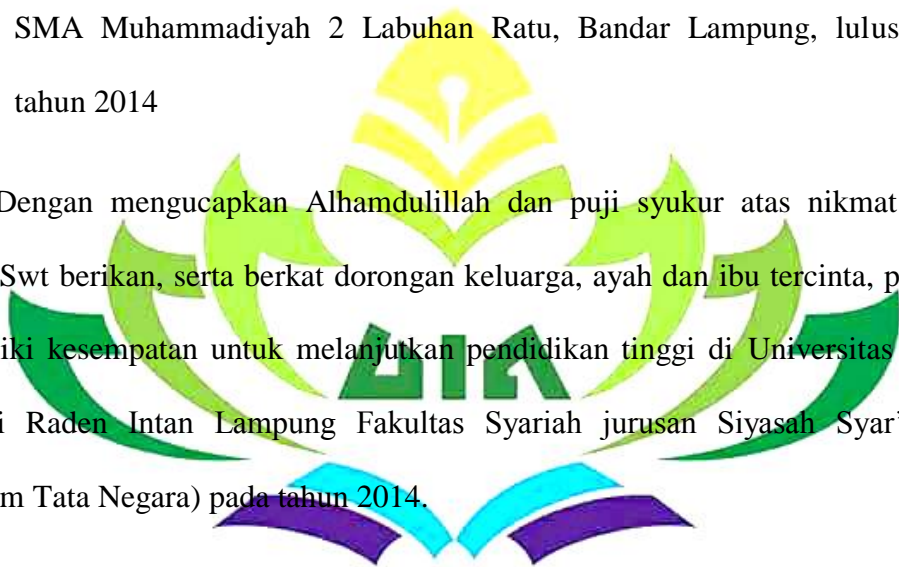
RIWAYAT HIDUP

Rizki Khairul, dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 13 Mei 1996. Anak ke tiga dari lima bersaudara, dari pasangan Bapak Chairul Manzil dan Ibu Elia Isda.

Riwayat pendidikan penulis yang telah diselesaikan :

1. SD Muhammadiyah 1 Labuhan Ratu, Bandar Lampung, lulus pada tahun 2008
2. SMPN 20 Bandar Lampung, lulus pada tahun 2011.
3. SMA Muhammadiyah 2 Labuhan Ratu, Bandar Lampung, lulus pada tahun 2014

Dengan mengucapkan Alhamdulillah dan puji syukur atas nikmat yang Allah Swt berikan, serta berkat dorongan keluarga, ayah dan ibu tercinta, penulis memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syariah jurusan Siyasa Syar'iyah (Hukum Tata Negara) pada tahun 2014.



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Swt, Penguasa semesta alam, penentu setiap kehidupan yang ada dimuka bumi ini yang telah memberikan kekuatan kesehatan jasad dan kelembutan ruh kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dalam rangka memenuhi syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dengan judul skripsi “ TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP TUGAS DAN KEWENANGAN KPU DALAM MEMVERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2019 DI INDONESIA”

Shalawat serta salam penulis ~~haturkan~~ kepada Nabi Muhammad Salallahu Alaihi Wassalam, ahlul bait beserta para sahabat dan pengikutnya yang ta'at pada ajaran islam yang sungguh sempurna.

Skripsi ini dapat diselesaikan dengan dukungan dan bantuan para pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih secara moril maupun materil kepada :

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang selalu tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Drs. Susiadi AS, M.Sos.I. selaku Ketua Jurusan Siyasah yang telah memfasilitasi segala kepentingan mahasiswa.
4. Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. dan Eti Karini, S.H., M.Hum. masing-masing selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu disela-sela kesibukan, serta memberikan bimbingan, arahan dan motivasi penulis sehingga skripsi ini selesai.
5. Seluruh dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran selama penulis duduk di bangku kuliah hingga selesai.
6. Pimpinan dan karyawan perpustakaan fakultas Syari'ah dan institut yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
7. Teman Seperjuangan Siyasah terkhusus dan terkasih *Law and Politic Grup Class HTN D*, Ali Ma'ruf,S.H., Achmad Junaedy Muchtar,S.H., Ariza

Rahmawati,S.H., Agustina Tri Widiastuti,S.H., Budi Santoso,S.H., Dede Wardana,S.H., Eka Budianta,S.E., Juwita Tri Utami,S.H., Krismanik Aji Chandra,S.H., Masmita,S.H., Muhammad Nurul Huda,S.H., Muhammad Harenggi,S.H.,Maya Armelia,S.H.,Oriza Wulandari,S.H., Reska Ismayni,S.H., Ulvi Maghvirotul Diniah,S.H., Wilda Zara Yunita,S.H., Wido Zuwika,S.H. yang semoga selalu dilancarkan segala urusannya.

8. Kelompok KKN 97 BumiRestu kec.Palas Kalianda terkhusus, Meli Apriyani, S.E., Rahma Nurlinda Sari,S.H., Septiana Dewi,S.Ag.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu tidak lain karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Akhirnya dengan keyakinan niat tulus ikhlas dan yakin usaha sampai semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu siyasah.

Bandar Lampung, 15 Oktober 2018
Penulis,

RIZKI KHAIRUL
NPM. 1421020217

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
F. Metode Penelitian	10
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Konsep Ahl Al-Halli Wa Al-Aqdi Menurut <i>Fiqh Siyasah</i>	14
1. Pengertian <i>ahl al-halli wa al-aqdi</i>	14
2. Kedudukan dan Wewenang <i>ahl al-halli wa al-aqdi</i>	16
3. Mekanisme pengambilan keputusan <i>ahl al-halli wa al-aqdi</i> ...	27
4. Praktek <i>ahl al-halli wa al-aqdi</i> dalam sejarah Pemerintahan Islam	30
BAB III TUGAS DAN KEWENANGAN KPU DALAM VERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2019 DI INDONESIA	
A. Pengertian KPU dan kedudukannya.....	35
B. Tugas dan Kewenangan KPU dalam melakukan verifikasi partai politik peserta pemilu 2019 di Indonesia	39

C. Prosedur dan Tekhnis Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu di Indonesia.....	49
--	----

BAB IV ANALISIS TUGAS DAN KEWENANGAN KPU DALAM VERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2019 DI INDONESIA MENURUT *FIQH SIYASAH*

A. Tugas dan Kewenangan KPU dalam Memverifikasi Partai Politik Peserta Pemilu di Indonesia.....	63
B. Tinjauan <i>Fiqh Siyasah</i> Terhadap Tugas dan Kewenangan KPU dalam Memverifikasi Partai Politik Peserta Pemilu di Indonesia	67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul skripsi ini adalah “ **Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Tugas dan Kewenangan KPU dalam Memverifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2019 di Indonesia** ”. Untuk menghindari kesalah pahaman dalam membahas judul skripsi ini maka terlebih dahulu akan menguraikan beberapa istilah penting dari judul tersebut.

Adapun istilah-istilah dari judul tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Tinjauan menurut bahasa berasal dari kata “tinjau”, yaitu berarti pandangan atau pendapat sesudah mempelajari dan menyelidiki suatu masalah.²
- b. Fiqh Siyasah adalah mengetahui ketentuan-ketentuan hukum tentang masalah-masalah politik yang dikaji dari dalil-dalil yang terinci dalam Al-Qur'an dan Sunnah.³
- c. Tugas ialah Kewajiban atau suatu pekerjaan yang harus dikerjakan seseorang dalam pekerjaanya.⁴
- d. Kewenangan adalah hak untuk sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu.

²Dapartemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm, 951

³Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial: Dirasah Islamiyah III*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 1994, h. 95

⁴*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*

- e. KPU (Komisi Pemilihan Umum) adalah, lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia yang bersifat nasional, mandiri dan tetap.⁵
- f. Verifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan penyajian, konfirmasi.
- g. Partai politik adalah kumpulan dari sekelompok orang dalam masyarakat yang berusaha untuk meraih atau mempertahankan kekuasaan suatu pemerintahan atau negara atau mempunyai orientasi, nilai, dan cita-cita yang sama.⁶
- h. Pemilu adalah pemilihan umum, sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.⁷

Berdasarkan penegasan judul diatas, jadi maksud dari judul penelitian ini adalah Tinjauan fiqh siyasah terhadap tugas dan kewenangan KPU sebagai lembaga yang menyelenggarakan pemilihan umum yang bersifat nasional, mandiri dan tetap dalam melakukan penelitian dan verifikasi partai politik peserta pemilu di Indonesia.

⁵ Gotfridus Goris Seran, *Kamus Pemilu Populer*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2003), hlm.342

⁶ A.A.Said Gatara, *Sosiologi politik, Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), h.221

⁷ Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2012, *Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD*, (Yogyakarta : PT Hafarima, 2012), h.2.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan yang mendorong penulis untuk memilih “Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Tugas dan Kewenangan KPU dalam Memverifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2019 di Indonesia” , adalah sebagai berikut :

1. Alasan Objektif

Permasalahan tersebut menarik untuk dibahas dan dilakukan penelitian, untuk mengkaji lebih dalam mengenai “Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Tugas dan Kewenangan KPU dalam Memverifikasi Partai Politik Pemilu 2019 di Indonesia”

2. Alasan Subjektif

Pembahasan ini sangat relevan dengan disiplin ilmu pengetahuan yang penulis pelajari di Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Siyasah serta terjadinya literatur yang menunjang sebagai referensi kajian dan data dalam usaha menyelesaikan karya ilmiah.

C. Latar Belakang Masalah

Nabi Muhammad Saw telah diutus oleh Allah Swt di atas muka bumi sebagai Rasullulah Saw untuk menyampaikan risalah, dan juga dalam fungsi kenabiannya membangun tata sosial yang taat kepada Syari’at. Disamping sebagai Nabi juga sebagai kepala negara telah menyuruh umatnya untuk menegakkan sebuah daulah yang berbentuk organisasi yang dapat mengelola umat apabila beliau sudah wafat, karena tujuannya agama tidak terealisasi dengan sesempurnanya dan seidealnya tanpa adanya negara. Karena tujuan dibangun sebuah organisasi negara ialah, menurut para tokoh seperti Al-Farabi menyebut

untuk meraih kebahagiaan, melindungi dan memberikan kebutuhan kepada manusia, karena kebutuhan manusia yang tidak dapat diselesaikan sendirinya, maka diperlukan realisasi dengan manusia lain. Kemudian Al-Ghazali juga menyebut disamping anjuran mendirikan negara, agama juga menuntun manusia untuk membentuk lembaga pemerintahan supaya dapat mengelolanya dan menjaganya serta menjalankannya.⁸

Ali Hasjmy juga mengatakan negara tidak dapat dijalankan tanpa adanya pemerintahan.⁹ Oleh sebab itu supaya negara bisa dijalankan oleh lembaga pemerintahan, maka harus ada seorang pemimpin untuk mengelola dan menjaganya. Di dalam sejarah pemerintahan Islam, kita mengenal konsep *imamah, khilafah, bai'ah, ahl al-halli wa al-aqdi, syura dan ummah*. Konsep-konsep tersebut yang sampai hari ini masih ramai dan menarik untuk didiskusikan adalah tentang konsep *khilafah, syura dan ahl al-halli wa al-aqdi*. karena konsep-konsep tersebut ada keterkaitan dengan sistem Demokrasi. Di mana *syura* diidentikkan dengan demokrasi dan *ahl al-halli wa al-aqdi* diidentikkan dengan DPR (Dewan Legislatif).

Nabi Saw tidak menetapkan peraturan secara rinci mengenai prosedur pergantian kepemimpinan umat akan tetapi dikemukakan beberapa firman Allah dalam Al-Qur'an menggunakan kata *syura* (musyawarah) dalam surat asy-Syura:38

وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ..

⁸ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqih Siyasah, Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta : Erlangga, 2008), h. 31-33

⁹ Siradjuddin, *Politik Ketatanegaraan Islam (Studi Pemikiran A.Hasjmy)*, cet.1 (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007), h.114

Artinya: “*Urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka*”¹⁰

Sedangkan ayat kedua, yaitu surat Ali Imran ayat 159 berbicara lebih umum dalam konteks yang lebih luas. Dalam surat Ali Imran 159 Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad Saw untuk melakukan musyawarah dengan para sahabat.

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ

تُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: *Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (QS. Ali-Imran : 159)*

Ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa perang uhud yang membawa kekalahan bagi umat Islam. Sedangkan dalam surat Asy-Syura;38 Allah menggambarkan sifat orang mukmin yang salah-satunya mementingkan musyawarah dalam setiap persoalan yang mereka hadapi.¹¹ Musyawarah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw berkisar tentang permasalahan yang belum diatur oleh wahyu dan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan urusan strategi perang, tetapi yang perlu ditekankan disini adalah musyawarah yang dilakukan oleh Nabi dan *al-khulafa ar-rasyidin*, dikenal berbagai mekanisme penetapan kepala negara, sebagai contoh Abu Bakar ditetapkan berdasarkan “pemilihan suatu musyawarah terbuka”, Umar bin al-Khattab ditetapkan berdasarkan “penunjukan kepala negara pendahulunya”. Usman bin al-Affan ditetapkan berdasarkan “pemilihan dalam suatu dewan formatur”, dan Ali bin Abi

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 789

¹¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, h. 185-186

Thalib berdasarkan “pemilihan melalui musyawarah dalam pertemuan terbuka”.¹² Dengan demikian suara mayoritas tidak selamanya diikuti atau dominan sehingga peluang suara minoritas untuk diikuti tetap ada.

Di dalam Al-Qur'an manusia diperintahkan untuk berbuat adil di antara sesama dan di dalam menetapkan keputusan, KPU sebagai lembaga yang punya kewenangan untuk melakukan verifikasi dan menetapkan partai politik peserta pemilu untuk berbuat adil hukumnya wajib, proses verifikasi partai politik peserta pemilu yang dilakukan oleh KPU harus berpedoman pada prinsip-prinsip keadilan, kesamaan di hadapan hukum dan bersih dari praktek *money politic*, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 90 dan An-Nisa ayat 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (QS. An-Nahl : 90).*¹³

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya*

¹² A.Djazuli, *Fiqh Siyasah “Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah”*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group,2003), hlm.17

¹³ Al-Quran dan Terjemahannya, h. 415

*kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An-Nisa : 58).*¹⁴

Tugas *ahl al-halli wa al-aqdi* tidak hanya bermusyawarah dalam perkara-perkara umum, tetapi tugas mereka juga mencakup melaksanakan peran pengawasan atas kewenangan legislatif sebagai wewenang pengawasan yang dilakukan oleh rakyat terhadap pemerintahan dan penguasa untuk mencegah mereka dari tindakan pelanggaran terhadap satu hak dari hak-hak Allah.¹⁵

Di dalam sistem pemerintahan modern khususnya sistem demokrasi, untuk menentukan pergantian pemerintahan yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum, dimana rakyat berhak dapat terlibat dalam proses pemilihan wakil mereka di parlemen dan pemimpin nasional maupun daerah tanpa ada intervensi dari pihak lain.¹⁶ Selain itu pemilu diselenggarakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten atau Kota dan DPD, yang menjadi peserta pemilu adalah partai-partai politik yang ada.

Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali yang diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, yang diselenggarakan oleh suatu komisi yang bernama Komisi Pemilihan Umum (KPU).¹⁷ Pemilihan umum yang diselenggarakan oleh KPU tersebut adalah merupakan sarana untuk

¹⁴*Ibid*, h. 128

¹⁵Farid Abdul Kholiq, *Fikih Politik Islam*, h. 80

¹⁶A.Ubaedillah, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2003), hlm.82

¹⁷Undang-Undang Dasar 1945 pasal 22 huruf E

perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Berdasarkan tugas dan kewenangan tersebut KPU berwenang untuk melakukan verifikasi secara administratif dan faktual terhadap partai politik peserta pemilu setelah ditetapkan sebagai badan hukum oleh menteri hukum dan HAM. Tujuan dari verifikasi partai politik adalah untuk mengetahui infrastruktur dan suprastruktur dari partai politik tersebut apakah layak atau tidak untuk menjadi peserta pemilu.

Menurut Undang-undang No 7 Tahun 2017 Pasal 12-13 Penyelenggaraan Pemilu, **Tugas KPU** yaitu merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum, menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan Pemilu. **Kewenangan KPU** yaitu menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu, menetapkan Peserta Pemilu, menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara, menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya.

Mengenai prosedur dan teknis proses penelitian dan verifikasi diatur dalam PKPU No 6 tahun 2018 tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik menjadi peserta Pemilu DPR, DPRD, Presiden dan wakil Presiden.

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai tugas dan kewenangan KPU dalam melakukan verifikasi partai politik peserta pemilu dan lembaga *ahl al-halli wa al-aqdi* yang ada dalam sejarah pemerintahan Islam maka penelitian ini dilakukan

secara mendalam mengenai pandangan *Fiqh Siyasah* terhadap tugas dan kewenangan KPU dalam melakukan verifikasi partai politik peserta pemilu di Indonesia tersebut.

D. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Tugas dan Kewenangan KPU dalam memverifikasi partai politik peserta pemilu 2019 di Indonesia ?
2. Bagaimanakah Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Tugas dan Kewenangan KPU dalam memverifikasi partai politik peserta pemilu 2019 di Indonesia?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui mengenai tugas dan kewenangan KPU dalam melakukan verifikasi partai politik peserta pemilu 2019 di Indonesia.
 - b. Untuk mengetahui mengenai pandangan *fiqh siyasah* terhadap tugas dan kewenangan KPU dalam melakukan verifikasi partai politik peserta pemilu 2019 di Indonesia.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Kegunaan teoritis, penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat untuk :

Menambah wawasan dan pengetahuan (referensi) bagi civitas akademika dan lembaga pendidikan di seluruh Indonesia kewenangan serta tekhnis

KPU dalam melakukan tugas verifikasi partai politik peserta pemilu 2019 di Indonesia.

- b. Kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi pertimbangan para pemegang kebijakan, politisi, KPU dan pihak-pihak terkait dalam membuat rencana strategis yang bertujuan peningkatan kualitas serta penegakan keadilan terhadap proses verifikasi partai politik peserta pemilu di Indonesia agar terwujud proses pemilu yang demokratis, jujur dan damai.
- c. Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Dalam penelitian hukum pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang selanjutnya dinamakan data primer. Dan data yang di peroleh dari bahan-bahan pustaka (*Library Research*) yang dinamakan data sekunder (data dasar).¹⁸

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat normatif yuridis yaitu penelitian hukum yang di dasarkan pada bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan mencoba untuk menganalisa suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan bahan-bahan lainnya yang relevan.

¹⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, h. 24

2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dari mana data itu diperoleh.¹⁹ Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data sekunder yaitu kesaksian atau sumber data yang tidak berkaitan langsung dengan sumbernya yang asli,²⁰ antara lain mencakup dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang.²¹
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu sumber yang diperoleh untuk memperkuat data yang diperoleh dari bahan hukum primer yaitu, buku-buku, makalah, jurnal, akses internet yang berkaitan dengan masalah tugas dan kewenangan KPU dalam melakukan tugas verifikasi partai politik peserta pemilu 2019 di Indonesia baik menurut Undang-undang dan *fiqh siyasah*.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik dokumentasi, yaitu cara mengumpulkan data-data yang tertulis yang telah menjadi dokumen atau instansi.²² Yaitu dengan mencari data mengenai tugas dan kewenangan KPU dalam memverifikasi partai politik peserta pemilu di Indonesia berupa Undang-Undang, Peraturan Atau Ketetapan-ketetapan KPU, catatan, transkrip buku, dan

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung : Tarsito, 1996),h. 143

²⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1998), h. 114

²¹ Muhammad Abdul kadir, *Hukum dan penelitian hukum* (Bandung:PT.Citra Aditia Bakti, 2004),hlm 133.

²² Sutrisno Hadi. *Metode Research* (Yogyakarta : Andy Offset. 1997), h.9

sebagainya. Dalam proses pengumpulan data ini di perlukan beberapa langkah, yaitu:

- a. Mencari dari berbagai sumber yang dibutuhkan.
- b. Mengumpulkan data secara acak dari berbagai ragam sumber data.
- c. Memilih data primer dan sekunder
- d. Dan naskah-naskah yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

4. Metode Pengelolaan Data

Data-data yang terkumpul kemudian diolah, pengolahan data sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan Data (*Editing*) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar, dan sesuai dengan masalah yang penulis teliti seperti buku-buku tentang Tugas dan Kewenangan KPU dalam verifikasi partai politik peserta pemilu.
- b. Rekonstruksi Data (*Reconstructing*), yaitu menyusun ulang secara teratur berurutan, logis sehingga mudah dipahami.²³
- c. Sistematisasi Data (*Systematizing*), yaitu berdasarkan pokok bahasan yang diidentifikasi dari rumusan masalah.²⁴

Setelah terkumpul data, penulis mengoreksi data dengan cara mengecek kelengkapan data yang sesuai dengan permasalahan, setelah itu memberikan catatan atau tanda khusus berdasarkan sumber data dan rumusan masalah,

²³ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Balai Pustaka, 2006), h.107

²⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2004).h.126.

kemudian disusun ulang secara teratur berurutan sehingga dapat menjadi sebuah permasalahan yang dapat dipahami, dengan menetapkan data secara sistematis sesuai dengan urutan permasalahan, sehingga dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil penelitian.

5. Metode Analisis Data

Data yang telah berhasil dihimpun akan dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitik dengan menggunakan pola deduktif.

Dalam pelaksanaan penelitian, setelah data terkumpul maka data tersebut di analisis dengan analisa deskriptif analitik dimana deskriptif adalah mengeksplorasi dan mengklarifikasi suatu fenomena dan kenyataan sosial.

Analisis deskriptif adalah memaparkan data-data yang terkait dengan masalah yang dibahas yang ditemukan dalam literatur dan kesimpulannya diambil melalui logika deduktif. Adapun data yang dianalisa dalam penelitian ini adalah mengenai tugas dan kewenangan KPU dalam melakukan verifikasi partai politik peserta pemilu 2019 di Indonesia perspektif *fiqh siyasah*. Sedangkan pola deduktif adalah memaparkan masalah-masalah yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

BAB II

AHL AL-HALLI WA AL-AQDI MENURUT FIQH SIYASAH

A. Konsep *Ahl al-halli wa al-aqdi*

1. Pengertian *Ahl al-Halli Wa al-Aqdi*

Secara bahasa *ahl al-halli wa al-aqdi* terdiri dari tiga kata; *Ahlul*, yang berarti orang yang berhak (yang memiliki). *Halli*, yang berarti melepaskan, menyesuaikan, memecahkan. *Aqdi*, yang berarti mengikat, mengadakan transaksi, membentuk. Para ahli *fiqh siyasah* merumuskan *ahl al-halli wa al-aqdi* sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat.²⁵ Dengan kata lain, *ahl al-halli wa al-aqdi* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat. Abu A'la al – Maududi menyebutkan *ahl al-halli wa al-aqdi* sebagai lembaga penengah dan pemberi fatwa, juga menyebut sebagai lembaga legislatif.²⁶

Bibit konsep *ahl al-halli wa al-aqdi* pertama kali muncul dalam masa Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab, sebelum kewafatannya menunjuk enam orang sahabat yang menjadi tim formatur untuk memilih Khalifah setelah beliau, yakni Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Saad bin Abi Waqash, Abdu al-Rahman bin Auf, Zubair bin Al-Awwam, dan Thalhah bin Ubaidillah

²⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Prenada Media Group, 2014), h. 137

²⁶ Abu A'la Al – Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, (Bandung : Mizan, 1995)h. 245

serta Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar hanya bertindak sebagai penasihat, dan tidak berfungsi sebagai calon.²⁷

Dasar dalam masalah ini adalah “bahwa rakyat yang memiliki kekuasaan dalam memilih pemimpin, sementara *ahl al-halli wa al-aqdi* mewakili mereka, kecil jumlahnya dari rakyat, tetapi memiliki kapabilitas untuk memikul tanggung jawab memilih pemimpin.”²⁸ Al-Mawardi menyebutnya dengan istilah *ahl al-ikhitiyar*²⁹, Ibnu Taimiyah menyebutnya *ahl al-syawkah*, ada juga yang menyebutnya *ahl al-syura*, *ahl al-ijtihad* bahkan *ulil amri*.

Perbedaan istilah tersebut muncul dikarenakan melihat tugas dan fungsi dari lembaga *ahl al-halli wa al-aqdi* yang memiliki kewenangan untuk memilih *khalifah*, menetapkan Undang-undang, melakukan musyawarah dan melakukan pengawasan terhadap *khalifah* selain itu juga mengacu pada pengertian “sekelompok anggota masyarakat yang mewakili umat (rakyat) dalam menentukan arah dan kebijaksanaan pemerintahan demi tercapainya kemaslahatan hidup mereka”.³⁰ Pada masa pemerintahan Umar bin Khatab istilah yang lebih populer untuk menyebut *ahl al-halli wa al-aqdi* adalah *ahl al-syura*, Jika anggota *ahl al-halli wa al-aqdi* mengadakan sidang untuk memilih imam (Khalifah), mereka harus mempelajari data pribadi orang-orang yang memiliki kriteria-kriteria *imamah* (kepemimpinan), kemudian mereka memilih siapa diantara orang-

²⁷ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta : Rajawali Press, 2010),h. 28

²⁸ Farid Abdul Kholiq, *Fikih Politik Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005), hlm.79

²⁹ A.Djazuli, *Fiqh Siyasah “Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah”*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group,2003), hlm.76

³⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, h. 138

orang tersebut yang paling banyak kelebihanannya, paling lengkap kriterianya, paling segera ditaati rakyat, dan mereka tidak menolak membaiaatnya.³¹

Praktek musyawarah yang dipraktekkan oleh para sahabat adalah bagian dari ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Nabi semasa hidupnya seringkali melakukan musyawarah atau berkonsultasi kepada sahabat-sahabat seniornya sebelum mengambil keputusan yang sifatnya belum ada wahyu atau perintah dari Allah Swt. Seperti pengambilan keputusan untuk menetapkan strategi perang badar, uhud, khandaq dan lain sebagainya.

Tugas mereka juga mencakup melaksanakan peran pengawasan atas kewenangan legislatif sebagai wewenang pengawasan yang dilakukan oleh rakyat terhadap pemerintah dan penguasa untuk mencegah mereka dari tindakan pelanggaran terhadap satu hak dari hak-hak Allah.³²

2. Kedudukan dan Wewenang *Ahl al-Halli Wa al-Aqdi*

Sebelum terlalu jauh penulis membahas mengenai kedudukan dan wewenang *ahl al-halli wa al-aqdi*, disini sekilas akan disampaikan mengenai nilai-nilai universal yang menjadi prinsip-prinsip dalam politik Islam. Dimana nilai-nilai tersebut jika ditelusuri secara mendalam mengenai peran Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maka akan ditemukan banyak hal yang direkomendasikan terutama berkenaan dengan prinsip-prinsip universal dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan demokratis.

³¹Imam Al-Mawardi, *Al Ahkam As-Sulthaniyyah "Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*, (Jakarta : PT Darul Falah, 2006), hlm.6

³² Farid Abdul Kholiq, *Fikih Politik Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005), hlm.80

Relevansi dari prinsip-prinsip universal ini dalam pemerintahan yang ada pada era hari ini adalah untuk dijadikan sebagai referensi atau patokan di dalam menjalankan roda-roda pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera, aman, damai dan tentram. Prinsip-prinsip tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:³³

1. Prinsip *al-Syura*

Di dalam Al-Qur'an dijelaskan pada surat as-Syura pada ayat 38 Allah berfirman :

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya: “ Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka”. (Q.S As syura : 38’)³⁴

Dari ayat tersebut dapat dikemukakan bahwa musyawarah merupakan suatu prinsip yang diajarkan Al-Qur'an sebagai prinsip etika politik, yang dijadikan sebagai media untuk mencapai hasil mufakat apabila terjadi perbedaan pendapat. Melalui musyawarah atau dialog juga, kekuasaan absolut dan totaliter dapat diminimalisir. Musyawarah secara metodologis diartikan sebagai forum dimana setiap persoalan yang menyangkut kepentingan umum atau rakyat dicari solusinya dan dipertimbangkan berdasarkan alasan-alasan yang rasional.

2. Prinsip *al-Musyawa* dan *al-Ikha'*

Keduanya mengandung pengertian persamaan dan persaudaraan. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan pada surat al-Hujarat ayat 13 Allah berfirman:

³³ A.Maftuh Abegebriel, A. Yani Abeveiro, *Negara Tuhan the Thematic Encyclopaedia*, (Jakarta : SR-ins Team, 2004), hlm. 1-11

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 789

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya : “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (Q.S Al Hujurat : 13)³⁵

Prinsip persamaan dan persaudaraan ini pernah di praktek kan nabi ketika menyusun piagam madinah, di mana nabi mengakui adanya perbedaan latar belakang agama masyarakat nabi selain itu juga nabi memperlakukan hak yang sama sebagai bagian dari manusia. Islam menganut prinsip persamaan diantara sesama manusia dihadapan sang pencipta, sementara yang membedakan adalah kualitas individu tersebut. Keberpihakan Islam pada prinsip persamaan ini didasarkan pada tujuan yang hendak diraih yaitu adanya pengakuan terhadap persaudaraan semesta. Selain dari pada itu juga dari prinsip persamaan ini, dalam kehidupan yang riil secara tidak langsung memberikan kontribusi untuk membangun budaya saling menghargai di antara sesama umat manusia dan dapat menciptakan ketulusan serta sepenanggungan didalam kehidupan masyarakat yang pluralis.

3. Prinsip *al-‘Adalah*

Prinsip ini mengandung arti keadilan yang harus ditegakkan tanpa diskriminasi, penuh kejujuran, ketulusan dan integritas. Pentingnya prinsip ini al-

³⁵ Ibid, hlm.847

qura'an menempatkan keadilan sebagai parameter orang yang bertaqwa. Dalam surat al-Maidah ayat 8 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S Al Maidah : 8)³⁶

Keadilan merupakan suatu prinsip yang harus ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, baik dibidang hukum, ekonomi, politik dan budaya. Karena sikap adil tersebut menjadi bagian dari ajaran nabi dan para sahabat di dalam memimpin masyarakat dan negaranya dalam sejarah pemerintahan Islam.

4. Prinsip *al-Hurriyyah*

Prinsip ini merupakan prinsip yang mendasar bagi hakekat kemanusiaan. Manusia diciptakan oleh tuhan dilengkapi dengan daya intelektualitas yang lebih sempurna. Dengan daya akal nya manusia akan mencerna tuntunan kebenaran, karena kebebasan berpikir dan kebebasan menyatakan pendapat merupakan fitrah manusia. Di dalam Islam, prinsip kebebasan mendapat perhatian yang lebih karena setiap individu pada dasarnya memiliki kebebasan. Seperti kebebasan memeluk agama, Al-Qur'an menjelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 256 Allah berfirman:

³⁶ Ibid, hal 159

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمَرْ
بِاللهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

Artinya : “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (Q.S Al Baqarah : 256)³⁷

5. Prinsip *al-Amanah*

Dalam Konteks kekuasaan negara, amanah merupakan mandat rakyat yang didalamnya terkandung nilai-nilai kontrak sosial yang tinggi. Bagi pengembal amanah wajib hukumnya menunaikannya secara adil. Prinsip ini merupakan sebuah prinsip yang harus dipelihara dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pentingnya prinsip ini Al-qur'an melalui surat An-nisa' ayat 58 Allah berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.³⁸ (Q.S An nisa' : 58)

6. Prinsip *al-Salam*

Islam mengedepankan perdamaian dalam segala aspek kehidupan, sesuai dengan tujuan risalah yang dibawa nabi sebagai *rahmatan lilalamin* bagi seluruh

³⁷ Ibid, hlm.63

³⁸ Ibid, hlm. 128

alam semesta. Maka prinsip perdamaian yang ada dalam doktrin politik Islam merupakan prinsip yang sangat penting dan harus ditegakkan, karena suatu hal yang dianjurkan dan diperintahkan oleh agama. Sebagaimana di kemukakan dalam Al-Qur'an pada surat Al-anfal ayat 61, Allah berfirman:

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْعَلْهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦١﴾

Artinya : “Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.³⁹ (Q.S Al Anfal : 61)

7. Prinsip *al-Tasamuh*

Prinsip ini berlaku universal, dimana saling menghargai atau menghormati antar sesama warga negara bukan saja terhadap sesama pemeluk Islam tetapi prinsip ini harus berlaku terhadap lintas agama dan negara. Seperti toleransi dan menghormati keyakinan orang lain. Pentingnya prinsip ini Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 2 dan surat Al-Kafirun ayat 6, Allah berfirman:

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢﴾

Artinya : “Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa”.⁴⁰ (Q.S Al-Baqarah: 2)

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴿٦﴾

Artinya : “Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku”.⁴¹ (Q.S Al-Kafirun: 6)

Dalam prinsip-prinsip universal di atas, kita mendapati bahwa *syura* merupakan bagian dari perintah tuhan sekaligus menjadi prinsip bagi umat Islam

³⁹ Ibid hlm. 271

⁴⁰ Ibid, hlm. 8

⁴¹ Ibid. hlm. 1112

dalam menjalankan roda-roda pemerintahan untuk menghindari pemerintahan yang otoriter dan diktator.

Kata *syura* berasal dari kata *sya-wa-ra*, yang secara etimologis berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah. Sejalan dengan pengertian tersebut kata *syura* mengandung makna segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat) untuk memperoleh kebaikan.⁴² Dalam al-qur'an surah as-Syura ayat-38 berbicara lebih umum dalam konteks yang lebih luas dimana Allah memerintahkan kepada nabi untuk bermusyawarah dengan sahabat. Yang bunyinya sebagai berikut:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka”.⁴³ (Q.S As syura : 38)

Dalam ayat tersebut, Allah menyebutkan bahwa yang dimusyawarahkan adalah *al-amar* yang secara sederhana kata ‘amar’ dapat diartikan dengan urusan, persoalan dan permasalahan. Ungkapan “*amruhum*” dalam ayat tersebut berarti urusan mereka, yaitu urusan itu bukan urusan individu, kelompok atau golongan elite melainkan urusan mereka bersama dan urusan umat secara keseluruhan. Selanjutnya perintah “*syura bainahum*” harus diputuskan melalui diskusi dan konsultasi bersama bukan diputuskan oleh seorang individu atau golongan elite yang tidak mereka pilih atau setuju.⁴⁴ Jadi yang dapat dimusyawarahkan adalah permasalahan atau persoalan umat secara keseluruhan atau umum. Namun

⁴² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, hal. 85

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 789

⁴⁴ Fazlur Rahman, *Masalah-Masalah Teori Politik*, hal. 127

Rasulullah melarang bermusyawarah dalam hal-hal bermaksiat kepada Allah Swt.⁴⁵

Dalam musyawarah suara mayoritas tidak harus selalu dimenangkan tetapi suara minoritas juga memiliki kesempatan untuk menjadi keputusan musyawarah dan yang menjadi peserta musyawarah adalah para ahli yang mempunyai pandangan jauh. Demokrasi juga menekankan unsur musyawarah dalam mengambil keputusan, yang diartikan sebagai bentuk kekuasaan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Yang mengharuskan adanya partisipasi rakyat dalam memutuskan suatu permasalahan dan mengontrol pemerintah yang berkuasa. Demokrasi membuka kesempatan yang sama kepada semua kekuatan politik, yang berasal dari partai politik atau perseorangan, untuk merebut kekuasaan.⁴⁶ Menurut Alamudi demokrasi adalah persamaan dan kebebasan. Secara rinci, Alamudi mengemukakan 11 (sebelas) prinsip demokrasi, Antara lain:⁴⁷

1. Kedaulatan rakyat
2. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah
3. Kekuasaan mayoritas
4. Hak-hak minoritas
5. Jaminan hak asasi manusia
6. Pemilihan yang bebas dan jujur

⁴⁵ Hadari Nawawi, *Kepemimpinan Menurut Islam*, (Yogyakarta : Gadjah Mada, 1993) hlm. 287- 288.

⁴⁶ Gunawan Suswanto, *Mengawal Penegak Demokrasi''Dibalik Tata Kelola Bawaslu Dan DKPP''* (Jakarta : Erlangga,2016),hlm.171

⁴⁷ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Negara, Demokrasi, dan Civil Society*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2012), hlm.39-40

7. Persamaan di depan hukum
8. Proses hukum yang wajar
9. Pembatasan pemerintah secara konstitusional
10. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik
11. Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama, dan mufakat

Berdasarkan prinsip-prinsip di atas, sepiantas kita dapat melihat bahwa demokrasi sesuai dengan prinsip *syura* yang diajarkan Al-Qur'an. Secara esensi, baik demokrasi maupun *syura* sama-sama membatasi kekuasaan pemerintah dan menekankan peran penting masyarakat dalam mengontrol kekuasaan. *Syura* dan demokrasi juga menekankan keputusan diambil secara musyawarah, sehingga dapat meminimalkan kekeliruan. Pemilihan umum merupakan suatu keniscayaan dan keharusan yang harus diselenggarakan sebagai media untuk memilih pemimpin negara atau pemerintah yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Tujuannya adalah untuk memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menentukan pemimpinnya tanpa ada intimidasi atau politik uang (*money politic*) secara sistematis.⁴⁸

Berbeda dengan pemilihan kepala negara yang ada dalam sejarah pemerintahan umat Islam, di mana *khalifah* yang memimpin negara atau pemerintahan, terkadang pemilihannya melalui mekanisme penunjukan langsung oleh khalifah sebelumnya atau dipilih melalui musyawarah yang diselenggarakan oleh *ahl al-halli wa al-aqdi* yang anggotanya ditunjuk atau dipilih oleh *khalifah*,

⁴⁸Anwar Arifin, *Politik Pencitraan-Pencitraan Politik*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2014), hlm.78

mekanisme ini bisa dinamakan sebagai pemilihan sistem perwakilan. Melihat dari cara pemilihan *khalifah* tersebut.

Berangkat dari penjelasan di atas, Maka fungsi dari *ahl al-halli wa al-aqdi* yang ada dalam pemerintahan Islam adalah sebagai berikut:⁴⁹

1. Hak untuk mengangkat dan memilih *khalifah*.
2. Hak untuk memecat dan memberhentikan *khalifah*.
3. Hak untuk membuat UU dan kebijakan.

Ahl al-halli wa al-aqdi adalah orang-orang yang ahli dalam memilih dan musyawarah, juga orang-orang yang ahli dalam mengawasi para pejabat. Sehingga harus memiliki persyaratan yang harus dipenuhi, menurut al-Farra *ahl al-halli wa al-aqdi* harus memiliki tiga syarat:

1. Adil.
2. Mempunyai ilmu pengetahuan yang dengan ilmu pengetahuan itu dapat mengetahui siapa saja yang berhak memegang tongkat kepemimpinan.
3. *Ahl al-halli wa al-aqdi* harus terdiri dari para pakar dan ahli manajemen yang dapat memilih siapa yang lebih pantas untuk memegang tongkat Kepemimpinan.⁵⁰

Kalau menurut al-Mawardi *ahl al-ikhtiyar* atau *ahl al-halli wa al-aqdi* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:⁵¹

1. Keadilan yang memenuhi segala persyaratan
2. Memiliki ilmu pengetahuan tentang orang yang berhak menjadi imam

⁴⁹ Abdul Qadir Jaelani, *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam*, h. 191

⁵⁰ Farid Abdul Kholiq, *Fikih Politik Islam*, h.109

⁵¹ A.Djajuli, *Fiqh Siyasah "Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group,2003),h.76

3. Memiliki kecerdasan dan kearifan yang menyebabkan dia mampu memilih imam yang paling maslahat.

Melihat dari syarat-syarat yang harus dimiliki oleh *ahl al-halli wa al-aqdi* tersebut, maka kedudukannya bisa dikatakan sebagai panitia pemilihan kepala negara atau badan legislatif yang dalam sistem negara modern memiliki fungsi untuk memilih dan memberhentikan kepala negara, yang anggotanya terbatas dan penunjukannya sangat selektif, sekaligus sebagai pengontrol terhadap eksekutif.

Lembaga *ahl al-halli wa al-aqdi* merupakan lembaga yang harus bersikap netral dan independent dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Sebagai lembaga yang melakukan pengawasan dan memutuskan atas nama rakyat, maka lembaga tersebut harus mengedepankan kepentingan rakyat. Karena kalau melihat lembaga perwakilan yang ada pada masa pemerintahan pasca Nabi dan khulafaurrasyidin yakni pada masa bani Umayyah dan Abbasiyah, lembaga tersebut keputusan-keputusannya hanya menjadi legitimasi pemerintah untuk melakukan penindasan terhadap rakyat.

Lembaga legislatif haruslah bekerja berdasarkan musyawarah. Namun kekuasaan atau wewengangnya dalam merancang dan menetapkan undang-undang mestilah mengikuti petunjuk Al-quran dan hadis, tidak di benarkan membuat dan meletakkan Undang-undang hanya untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu saja. Perkara-perkara yang oleh Allah dan Rasul-Nya telah tetapkan hukum-hukumnya dengan jelas atau telah ditetapkan batasan-batasan dan prinsip prinsipnya, maka badan legislatif ini dibolehkan membuat penafsiran penafsiran,

perincian atau mengajukan saran-saran untuk membuat kaidah-kaidah, peraturan-peraturan tambahan dan ikatan-ikatan khusus dalam melaksanakannya.⁵²

Berdasarkan penjelasan di atas, mengenai kedudukan dan kewenangan *ahl al-halli wa al-aqdi* bisa dikatakan, bahwa *ahl al-halli wa al-aqdi* adalah sebagai panitia penyelenggara pemilihan *khalifah* yang keanggotaannya sangat terbatas dan ditunjuk oleh *khalifah*. Kewenangan *ahl al-halli wa al-aqdi* adalah sebagai pengontrol terhadap kekuasaan eksekutif dan membantu eksekutif untuk merumuskan kebijakan-kebijakan negara demi kemaslahatan rakyat.

3. Mekanisme Pengambilan Keputusan *Ahl al-hall wa al-aqd*

Musyawarah untuk mufakat merupakan bagian dari mekanisme pengambilan keputusan selain voting, yang biasa dijadikan sebagai sarana pengambilan keputusan dalam organisasi-organisasi modern dan lembaga-lembaga negara di era ini.

Pada masa nabi misalnya, ketika musyawarah menentukan sikap dalam menghadapi perang uhud. Sebagian kecil sahabat punya pendapat sebaiknya bertahan di Madinah, namun kebanyakan sahabat, terutama yang muda-muda dan belum sempat ikut dalam perang badar sebelumnya, cenderung ingin menyongsong lawan di medan terbuka. Maka Rasulullah Saw pun ikut pendapat mayoritas, meski beliau sendiri tidak termasuk yang mendukungnya. Sebelumnya

⁵²Abu al A'la al-Maudûdi, *Khilâfah wa al-Mulk*, terj. M.Baqir "Khilafah dan Kerajaan", (Bandung : Mizan, 1984) h. 74.

dalam perang badar, juga Rasulullah Saw memutuskan untuk mengambil suara terbanyak, tentang masalah tawanan perang, umumnya pendapat menginginkan tawanan perang, bukan membunuhnya.

Hanya Umar bin Al-Khattab saja berpendapat bahwa tidak layak umat Islam minta tebusan tawanan, sementara perang masih berlangsung. Walaupun kemudian turun ayat yang mengoreksi ijtihad nabi Saw dan membenarkan pendapat Umar ra, namun peristiwa ini menggambarkan bahwa ada proses voting dalam pengambilan keputusan dalam sejarah nabi Saw.

Begitu juga pada masa *khulafaurrasyidin*, untuk pertama kali dalam sejarah Islam dilakukan pemilihan umum adalah ketika Nabi Muhammad Saw meninggal dunia, mereka berkumpul di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang bernama *Saqifah banu Sa'idah*, di tempat itu Abu Bakar Syidiq Ra terpilih dalam kemenangan suara tipis melawan Ali bin Abu Thalib Ra.⁵³

Musyawah adalah merupakan pertemuan para ahli untuk membahas suatu permasalahan dengan saling mengemukakan pendapat para anggota, diminta atau tidak, agar memperoleh kesimpulan yang baik dan berdasarkan niat tawakkal kepada Allah. Dalam melaksanakan musyawarah ada empat unsur penentu yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu:⁵⁴

1. *Mustasyir* adalah orang yang menghendaki adanya musyawarah dan menginginkan suatu pendapat yang benar atau mendekati kebenaran.
2. *Musyasyar* adalah orang yang diajak bermusyawah.
3. *Mustasyar fih* adalah permasalahan yang akan dikaji atau obyek musyawarah.

⁵³ Inu kencana syafiie, *Ilmu Politik*, (Jakarta : Rieneka Cipta, 2010), hlm.224

⁵⁴ Artani Hasbi, *Musyawah Dan Demokrasi Analisis Konseptual Aplikatif Dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Politik Islam*, h.21-22

4. *Ra'yu* adalah pendapat bebas yang argumentatif.

Musyawaharah merupakan esensi ajaran Islam yang wajib ditetapkan dalam kehidupan sosial umat Islam. Syura memang merupakan tradisi Arab pra Islam yang sudah turun-temurun. Oleh Islam tradisi ini dipertahankan karena syura merupakan tuntutan abadi dari kodrat manusia sebagai makhluk sosial.⁵⁵

Berdasarkan literatur yang ada, nabi Muhammad Saw sebelum mengambil keputusan mengenai strategi perang ada proses musyawarah atau konsultasi yang dilakukan bersama sahabat, seperti perang badar, uhud, khandaq dan lain sebagainya. Begitu juga dalam lembaga *ahl al-hall wa al-aqd*, sebelum penetapan siapa yang menjadi *khalifah* untuk selanjutnya, musyawarah merupakan kewajiban yang harus dilakukan sekaligus melakukan penjaringan aspirasi rakyat siapa yang layak untuk menjadi *khalifah*.

Setelah proses musyawarah dilakukan dan penjaringan aspirasi dijalankan maka penetapan siapa yang menjadi *khalifah* bisa dilaksanakan. Perintah musyawarah dalam al-Quran terdapat di dalam surat as-Syura ayat 38 dan surat Ali Imran ayat 159. Sebagai berikut:

وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ..

Artinya: “Urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka”⁵⁶

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۚ فَاعْفُ عَنْهُمْ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ ۚ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila

⁵⁵ Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, (Jakarta: Mizan, 1995), hlm,203

⁵⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 128

kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (QS. Ali-Imran : 159)

Dalam Sistem pemerintahan menurut Islam, musyawarah atau syura, memegang peranan yang penting, karena musyawarah merupakan jalan untuk setiap musyawarah dalam benar, mengemukakan mendiskusikan berbagai macam pendapat, yang pada akhirnya akan dihasilkan suatu pendapat yang benar. Jadi mekanisme pengambilan keputusan dalam lembaga *ahl al-hall wa al-aqd* adalah musyawarah.

Berdasarkan penjelasan di atas, musyawarah merupakan mekanisme pengambilan keputusan yang dipakai oleh Rasulullah dan para *khalifah* setelahnya. Begitu juga dengan lembaga *ahl al-hall wa al-aqd* musyawarah merupakan sesuatu yang amat penting bagi sarana pengambilan keputusan untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis. Apabila musyawarah tidak bisa dijadikan sebagai media pengambilan keputusan maka voting adalah jalan terakhir yang fair dan demokratis untuk mengambil keputusan bersama.

4. Praktek *Ahl al-Hall wa al-Aqd* dalam Sejarah Pemerintahan Islam

Dalam sejarah pemerintahan umat Islam pasca kepemimpinan nabi Muhammad, mekanisme pemilihan *khalifah* atau pengganti nabi pada masa *al-khulafa' al-rasyidin* berbeda-beda. Abu Bakar menerima jabatan Khalifah pada saat sejarah Islam dalam keadaan krisis dan gawat. Yaitu timbulnya perpecahan, munculnya para nabi palsu dan terjadinya berbagai pemberontakan yang mengancam eksistensi negeri Islam yang masih baru. Memang pengangkatan Abu Bakar berdasarkan keputusan bersama (musyawarah di balai Tsaqifah Bani

Sa'idah) akan tetapi yang menjadi sumber utama kekacauan ialah wafatnya nabi dianggap sebagai terputusnya ikatan dengan Islam, bahkan dijadikan persepsi bahwa Islam telah berakhir. Abu Bakar bukan hanya dikatakan sebagai Khalifah, namun juga sebagai penyelamat Islam dari kehancuran karena ia telah berhasil mengembalikan ummat Islam yang telah bercerai berai setelah wafatnya Rasulullah Saw.

Peristiwa Tsaqifah Bani Sa'idah Setelah Rasulullah Saw wafat, para sahabat segera berkumpul untuk bermusyawarah di suatu tempat yaitu Tsaqifah Bani Sa'idah (semacam MPR dulu dikenal dengan Nadi al-Qoum) guna memilih pengganti Rasulullah (Khalifah) memimpin ummat Islam. Musyawarah itu secara spontanitas diprakarsai oleh kaum Anshor. Sikap mereka itu menunjukkan bahwa mereka lebih memiliki kesadaran politik dari pada yang lain, dalam memikirkan siapa pengganti Rasulullah dalam memimpin umat Islam. Pihak Anshar mencalonkan Sa'ad bin Ubaidah. Hingga peristiwa tersebut diketahui Umar, ia kemudian pergi ke kediaman Nabi dan mengutus seseorang untuk menemui Abu Bakar. Kemudian keduanya berangkat dan diperjalanan bertemu dengan Ubaidah bin Jarroh.⁵⁷ Setibanya di balai Bani Sa'idah, mereka mendapatkan dua golongan besar kaum Anshor dan Muhajirin bersitegang.

Dengan tenang Abu Bakar berdiri di tengah-tengah mereka, kemudian berpidato yang isinya merinci kembali jasa kaum Anshor bagi tujuan Islam. Di sisi lain ia menekankan pula anugrah dari Allah yang memberi keistimewaan kepada kaum Muhajirin yang telah mengikuti Muhammad sebagai Nabi dan

⁵⁷ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, h. 21

menerima Islam lebih awal dan rela hidup menderita bersama Nabi. Abu Bakar juga berpidato di hadapan para sahabat yang ada disana dengan alasan hadits Nabi: al-Aimmatu min Quraiys (kepemimpinan dalam Islam adalah dari golongan Quraisy). Akhirnya Abu Bakar terpilih sebagai Khalifah ar-Rasul (pengganti Rasul).⁵⁸ Abu Bakar terpilih menjadi khalifah dengan alasan utamanya adalah senioritas karena sejak mula pertama Islam diturunkan menjadi pendamping Nabi, dialah sahabat yang paling memahami risalah Rasul. Abu Bakar merupakan tokoh tua yang sangat dihormati serta orang yang pertama kali masuk Islam dari golongan tua.

Mendengar ucapan Abu Bakar tersebut, orang-orang Anshar tampaknya sangat terkesan dan Umar tidak menyia-nyiakan momentum untuk membai'at dan menyatakan kesetiannya kepada Abu Bakar, setelah Umar membai'at kelompok Anshar mengikutinya untuk berbai'at.⁵⁹ Baiat tersebut dinamakan baiat Tsaqifah karena bertempat di balai Tsaqifah Bani Sa'idah. Pertemuan politik itu berlangsung hangat, terbuka, demokratis dan berdaulat. Pertemuan politik itu merupakan peristiwa sejarah yang penting bagi umat Islam. Sesuatu yang mengikat mereka tetap dalam satu kepemimpinan pemerintahan. Terpilihnya Abu Bakar menjadi Khalifah Pertama, menjadi dasar terbentuknya sistem pemerintahan Khalifah dalam Islam.

Sedangkan Umar bin Khatab berbeda dengan pemilihan pendahulunya, terpilihnya Umar bin Khatab sebagai *khalifah* melalui penunjukan atau wasiat oleh pendahulunya. Pada tahun ketiga Abu Bakar sejak menjabat sebagai *khalifah*,

⁵⁸Abdul Karim, *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam* (Yogyakarta:Bagaskara, 2012), hlm. 79

⁵⁹Munawir Sjadzali. Op.cit. h. 23

Abu Bakar mendadak jatuh sakit. Selama masa sakitnya, Abu Bakar merekomendasikan tugasnya sebagai imam solat kepada Umar bin Khattab. Abu Bakar merasa khawatir dengan rasa sakit yang dideritanya dan tidak segera menunjuk penggantinya. Bagi Abu Bakar orang yang paling tepat untuk menggantikannya tidak lain adalah Umar bin Khatab. Maka dia mulai mengadakan rapat tertutup dengan sahabat senior yang kebetulan menengok di rumahnya di antaranya adalah Abd al-Rahman bin Auf dan Usman bin Affan dari kelompok Muhajirin serta Asid bin Khudair dari kelompok Anshar. Selesai mereka musyawarah Abu Bakar berpesan kepada mereka agar tidak menceritakan hasil musyawarah tersebut kepada umat Islam yang lain. Setelah berapa hari Abu Bakar memanggil Usman bin Affan untuk mendiktekan wasiatnya.

Baru saja dari setengah wasiatnya tersebut Abu Bakar pingsan tetapi Usman bin Affan melanjutkan menulisnya. Ketika Abu Bakar sadar kembali, dia meminta Usman untuk membacakannya yang pada intinya bahwa Abu Bakar menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya untuk memegang jabatan *khalifah*. Sesuai dengan pesan tersebut, sepeninggal Abu Bakar, Umar bin Khattab dikukuhkan sebagai kholifah kedua dalam suatu bai'at umum dan terbuka di masjid Nabawi.⁶⁰

Berbeda dengan munculnya Usman bin Affan sebagai *khalifah*, dia dipilih oleh kelompok yang nama-namanya sudah ditentukan oleh Umar sebelum dia wafat. Umar menunjuk sahabat-sahabat senior dengan jumlah tujuh orang di antaranya; Ali bin Abu Thalib, Utsman bin Affan, Saad bin Abu Waqqash, Abd

⁶⁰ *Ibid.* h 24-25

al-Rahman bin Auf, Zubair bin Awwam, Thalhah bin Ubaidillah dan Abdullah bin Umar.⁶¹

Ali bin Abu Thalib, dua belas tahun kemudian, diangkat menjadi *khalifah* yang keempat melalui pemilihan, yang penyelenggaraannya jauh lebih sempurna. Dimana setelah para pemberontak membunuh Usman bin Affan, Ali diminta kesediaanya untuk menjadi *khalifah*. Tetapi Ali menolak permintaan para pemberontak dan menayakan dimana peserta pertempuran perang badar, dimana Thalhah, Zubair dan Sa'ad karena merekalah yang berhak menentukan siapa yang menjadi *khalifah*. Maka munculah tiga sahabat-sahabat senior itu dan berbai'at kepada Ali dan segera diikuti oleh banyak orang.⁶²

Melihat sejarah di atas kita bisa mengambil kesimpulan, bahwa pemilihan *khalifah* pasca kepemimpinan nabi Muhammad melalui dua macam bentuk, yakni:

- a. Penunjukan oleh *khalifah* sebelumnya
- b. Melalui pemilihan yang dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh *khalifah*.

⁶¹ *Ibid.* h 25-26

⁶² *Ibid.* . h .27

BAB III

TUGAS DAN KEWENANGAN KPU DALAM MELAKUKAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DI INDONESIA

A. Pengertian KPU dan Kedudukannya

Komisi Pemilihan Umum, disingkat KPU, dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar tahun 1945 mengatur tentang Komisi Pemilihan Umum, bahwa “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.”⁶³ Menurut UU No. 22 tahun 2007 dinyatakan kalimat yang berbeda, yaitu “wilayah kerja KPU meliputi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjalankan tugasnya secara berkesinambungan dan dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun berkaitan dengan tugas dan wewenangnya.”⁶⁴

Menurut UU No 7 tahun 2017 pasal 1 (1) ketentuan umum, **Pemilihan umum** adalah sarana kedaulatan rakyat yang diselenggarakan oleh KPU untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur,

⁶³ Gotfridus Goris Seran, *Kamus Pemilu Populer* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2003), hlm.342

⁶⁴ Rozali Abdullah, *Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas*, (Jakarta : Raja Grafindo persada, 2009), hlm.19

dan adil.⁶⁵ Tidak terdapat intimidasi atau politik uang (*money politic*) secara sistematis.⁶⁶

Pemilihan Umum dimaknai sebagai realisasi sarana untuk memberikan dan memperkuat legitimasi rakyat.⁶⁷ Realisasi dan makna keduanya sangat kental dengan tarik menarik kepentingan politik bahkan fenomena Pemilu bukan saja menjadi keunikan tersendiri sebab Pemilu tidak hanya menjadi kewajiban penguasa untuk menyelenggarakannya. Pemilu merupakan satu kriteria untuk mengukur standard dan kadar politik sebuah sistem politik. Selain itu, Pemilu merupakan hak rakyat untuk membentuk pemerintahan yang demokratis. Kemudian, Pemilu sebagai alat demokrasi, dijalankan di atas prinsip jujur, bersih, bebas kompetitif dan adil.⁶⁸

Fungsi Pemilu, menurut Aurel Croissant⁶⁹, Pemilu dikelompokkan ke dalam tiga jenis, yaitu: (a) Fungsi Keterwakilan (*Representativeness*), dalam arti kelompok-kelompok masyarakat memiliki perwakilan ditinjau dari aspek geografis, fungsional dan deskriptif. (b) Fungsi Integrasi, dalam arti terciptanya penerimaan partai terhadap partai lain dan masyarakat terhadap partai. (c) Fungsi Mayoritas yang cukup besar untuk menjamin stabilitas pemerintah dan kemampuannya untuk memerintah (*governability*.) Reinhold Zippelius menegaskan bahwa Pemilihan Umum harus secara efektif menentukan siapa-siapa

⁶⁵ UU No 7 Tahun 2017 Pasal 1 Ketentuan Umum

⁶⁶ Anwar arifin, *Politik Pencitraan-Pencitraan Politik*,(Yogyakarta : Graha Ilmu, 2014),hlm.78

⁶⁷ Muhammad, *Pemilihan Umum dan Legitimasi Politik*, (Jakarta: Yayasan Buku Obor, 1998), h. 49-50.

⁶⁸ Jurnal Al- 'Adalah Vol.XII, No.2 Desember 2014, hlm.6

⁶⁹ Joko J. Prihatmoko, *Mendemostrasikan Pemilu, Dari Sistem sampai Elemen Teknis*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), hlm.4-5

yang memimpin negara dan arah kebijakan apa yang ambil, serta bahwa dalam demokrasi, pendapat umum memainkan peranan penting.⁷⁰

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 1 (7) , Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden.⁷¹ Yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak mana pun.

Dalam Undang-Undang tersebut juga diatur mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang permanen dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu. KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan Pemilihan umum dan tugas lainnya. KPU menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan tembusan kepada Bawaslu.⁷²

⁷⁰ Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi*, (Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2006), hlm.73

⁷¹ UU No 7 Tahun 2017 Pasal 1(7) Penyelenggaraan Pemilu

⁷² *Ibid.* Pasal 14 huruf g

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 6 Tentang Penyelenggara Pemilu juga mengatur kedudukan panitia pemilihan yang meliputi PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), PPS (Panitia Pemungutan Suara), KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) dan PPLN (Panitia Pemilihan Luar Negeri) serta KPPSLN (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri). Panitia tersebut mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan umum dalam rangka mengawal terwujudnya Pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.⁷³ Berdasarkan jenjang waktunya, Pemilu Presiden dan legislatif dilaksanakan setiap lima tahun.⁷⁴

Secara institusional KPU yang ada sekarang merupakan KPU keempat yang dibentuk sejak era reformasi 1998. Yang diantaranya, KPU pertama (1999-2001) dibentuk dengan Keppres No. 16 Tahun 1999 yang berisikan 53 orang anggota yang berasal dari unsur pemerintah dan partai politik dan dilantik oleh Presiden BJ. Habibie. KPU kedua (2001-2007) dibentuk dengan Keppres No. 10 Tahun 2001 yang berisikan 11 orang anggota yang berasal dari unsur akademis dan LSM dan dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tanggal 11 April 2001. KPU ketiga (2007-2012) di bentuk berdasarkan Keppres No. 101/P/2007 yang berisikan 7 orang anggota yang berasal dari anggota KPU propinsi, akademisi, peneliti dan birokrat dilantik tanggal 23 Oktober 2007 oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono.⁷⁵

⁷³ *Ibid.* Pasal 2 Ketentuan Umum

⁷⁴ Jurnal *Politik Profetik* Vol.3, No 1 tahun 2004, hlm.8

⁷⁵ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Komisi_Pemilihan_Umum, diakses pada tanggal 2 Juni 2018 Pukul 08.35 WIB.

Dalam UU No 7 Tahun 2017 Pasal 3 Ketentuan Umum Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilihan umum, di dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum berpedoman pada asas:⁷⁶

- a. Mandiri;
- b. Jujur;
- c. Adil;
- d. Berkepastian hukum;
- e. Tertib;
- f. Terbuka;
- g. Proporsionalitas;
- h. Profesionalitas;
- i. Akuntabel;
- j. Efektif; dan
- k. Efisien.



Menurut UU No 7 Tahun 2017 Pasal 8 Penyelenggaraan Pemilu Sebagai panitia penyelenggara pemilihan umum KPU berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia, KPU Provinsi di ibu kota provinsi dan KPU Kabupaten berkedudukan di ibu kota, KPU Kota berkedudukan di pusat pemerintahan kota, dan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota berkedudukan sebagai lembaga nonstruktural.⁷⁷

⁷⁶ UU No 7 Tahun 2017 Pasal 3 Ketentuan Umum

⁷⁷ UU No 7 Tahun 2017 Pasal 8 Penyelenggaraan Pemilu

B. Tugas dan Kewenangan KPU dalam Melakukan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu di Indonesia

Dalam menjalankan tugas dan wewenang KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal yang dipimpin oleh Sekretariat Jenderal dan wakil Sekretariat Jenderal, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris.⁷⁸ Sebagian dari tugas dan kewenangan KPU sebagai komisi penyelenggara pemilihan umum adalah melakukan verifikasi terhadap partai politik peserta pemilu di Indonesia. Setelah dilakukan verifikasi oleh KPU dan lolos dari proses verifikasi tersebut, barulah partai-partai yang ada sah menjadi peserta pemilu.

Sebelum penulis terlalu jauh membahas mengenai tugas dan kewenangan KPU, disini sekilas akan disampaikan mengenai tujuan dan fungsi partai politik, hak dan kewajiban partai politik dan persyaratan yang harus di penuhi oleh partai politik untuk menjadi peserta pemilu di di Indonesia, baik pemilu anggota DPR DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-Undang no 2 tahun 2011 tentang partai politik. Karena sebelum proses penelitian atau verifikasi yang dilaksanakan oleh KPU, partai politik dapat menjadi peserta Pemilu, dengan terlebih dahulu mengajukan surat permohonan menjadi peserta Pemilu kepada KPU. Surat permohonan yang dimaksud ditandatangani oleh ketua umum atau sebutan lain pengurus pusat partai politik.⁷⁹ Kemudian didaftarkan kepada departemen hukum dan HAM dan setelah itu ada proses penelitian atau verifikasi yang diselenggarakan oleh menteri hukum dan HAM.

⁷⁸ Rozali Abdullah, *Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas*, (Jakarta : Raja Grafindo persada, 2009), hlm.20

⁷⁹ *Ibid.* hlm. 165

Di mana proses penelitian atau verifikasi yang dilakukan oleh menteri hukum dan HAM bertujuan untuk menjadikan atau mengesahkan institusi partai politik menjadi badan hukum. Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk dari oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.⁸⁰

Menurut UU No 2 tahun 2011 Pasal 1-2 tentang Partai Politik. **Tujuan partai politik** yakni.⁸¹

1. Tujuan Umum Partai Politik adalah:

- a. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- b. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

⁸⁰ M.Rifqinizamy Karsayuda, *Partai Politik Lokal Untuk Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 381

⁸¹ UU No 2 tahun 2011 Pasal 1-2 tentang Partai Politik

2. Sedangkan **tujuan khusus** partai politik adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan.
- b. Memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan
- c. Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

3. Tujuan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diwujudkan secara konstitusional.

Pada umumnya Partai Politik yang terdapat diberbagai negara melaksanakan fungsi-fungsi, fungsi Partai politik tersebut sebagai berikut :⁸²

- 1) Partai politik sebagai sarana Sosialisasi politik
- 2) Partai politik sebagai sarana Rekrutmen politik
- 3) Partai politik sebagai sarana Komunikasi politik
- 4) Partai politik sebagai sarana Artikulasi dan Agregasi kepentingan
- 5) Partai politik sebagai sarana Partisipasi politik
- 6) Partai politik sebagai sarana Pengatur konflik
- 7) Partai politik sebagai sarana Pembuatan kebijaksanaan
- 8) Partai politik sebagai sarana Untuk mengkritik rezim yang berkuasa

⁸² Haryanto, *Partai Politik Suatu Tinjauan Hukum*, (Yogyakarta : LIBERTY, 1984), hlm.14

Fungsi partai politik menurut UU No 2 tahun 2011 adalah sebagai berikut :

- a. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi Warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
- b. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat
- c. Penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan Negara
- d. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Hak partai politik dalam Undang-Undang No 2 tahun 2011 Pasal 12 sebagai berikut:⁸³

- a. Memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara.
- b. Mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri.
- c. Memperoleh hak cipta atas nama, lambang, dan tanda gambar partai politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

⁸³ *Ibid.* pasal 12-13

- e. Membentuk fraksi ditingkat Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f. Mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
- g. Mengusulkan pemberhentian anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
- h. Mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Gubernur dan Wakil Gubernur, calon Bupati dan Wakil Bupati, serta calon Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- i. Membentuk dan memiliki organisasi sayap partai politik.
- j. Memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan **kewajiban partai politik** adalah:

- a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan.
- b. Memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- c. Berpartisipasi dalam pembangunan nasional.
- d. Menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia.
- e. Melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik anggotanya.
- f. Menyukseskan penyelenggaraan pemilihan umum.
- g. Melakukan pendaftaran dan memelihara ketertiban data anggota.
- h. Membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima, serta terbuka kepada masyarakat.
- i. Pendapatan dan belanja daerah secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada pemerintah setelah diperiksa oleh badan pemeriksa keuangan.
- j. Memiliki rekening khusus dana kampanye pemilihan umum.
- k. Menyosialisasikan program partai politik kepada masyarakat.

KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum, sebelum acara pesta demokrasi tersebut diselenggarakan KPU berkewajiban untuk menetapkan jadwal atau tahapan penyelenggaraan pemilihan umum.

Menurut PKPU No 6 tahun 2018 pasal 14, **KPU bertugas:**

- a. Menerima dokumen persyaratan
- b. Menerima rekapitulasi keanggotaan Partai Politik untuk setiap Kabupaten/Kota
- c. Meneliti kelengkapan pemenuhan dokumen persyaratan

d. Mencatat penerimaan dokumen pendaftaran menggunakan formulir

MODEL TT.KPU-PARPOL yang berisi :

1. Nama partai politik
2. Hari, tanggal dan waktu penerimaan
3. Tempat penerimaan dokumen
4. Nama Pengurus Partai Politik yang melakukan pendaftaran
5. Jabatan Pengurus Partai Politik yang melakukan pendaftaran
6. Nomor telepon genggam Pengurus Partai Politik yang melakukan pendaftaran
7. Tanda tangan Pengurus Partai Politik yang melakukan pendaftaran
8. Memberikan tanda bukti penerimaan penyerahan dokumen persyaratan dengan MODEL TT.KPU-PARPOL

Dalam Undang-undang No 7 Tahun 2017 Pasal 12-13 Penyelenggaraan

Pemilu, **Tugas KPU** adalah sebagai berikut:⁸⁴

- a. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal.
- b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN.
- c. Menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu.
- d. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan.
- e. Menerima daftar pemilih dari KPU provinsi.

⁸⁴ Undang-undang No 7 Tahun 2017 Pasal 12-13 Penyelenggaraan Pemilu

- f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan sebagai daftar pemilih.
- g. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu.

Dalam Undang-undang No 7 Tahun 2017 Pasal 12-13 Penyelenggaraan Pemilu, **Kewenangan KPU**, sebagai berikut:

- a. Menetapkan tata kerja KPU, KPU provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN.
- b. Menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu.
- c. Menetapkan Peserta Pemilu.
- d. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU provinsi untuk pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tiap-tiap KPU provinsi untuk pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikasi hasil penghitungan suara.
- e. Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya.
- f. Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/kota untuk setiap Partai

Politik peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- g. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan.
- h. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye.
- i. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.

Menurut UU No 7 Tahun 2017 Pasal 177 Pelaksanaan Pemilu, harus memperhatikan **kelengkapan kebenaran dokumen partai politik** yang meliputi:⁸⁵

- a. Berita Negara Republik Indonesia yang memuat tanda terdaftar bahwa partai politik tersebut terdaftar sebagai badan hukum.
- b. Keputusan pengurus pusat partai politik tentang pengurus tingkat provinsi dan pengurus tingkat kabupaten/kota.
- c. Surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang kantor dan alamat tetap pengurus tingkat pusat, pengurus tingkat provinsi, dan pengurus tingkat kabupaten/kota.
- d. Surat keterangan dari pengurus partai politik tentang persyaratan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

⁸⁵ *Ibid.* Pasal 177 Pelaksanaan Pemilu

- e. Surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan tanda gambar partai politik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- f. Bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kabupaten/kota.
- g. Bukti kepemilikan nomor rekening atas nama partai politik dan
- h. Salinan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Proses verifikasi yang diselenggarakan oleh KPU harus selesai dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) bulan sebelum hari pemungutan suara. Dan mengenai pelaksanaan dan waktu serta prosedur dan teknis verifikasi diatur dengan peraturan KPU.⁸⁶

C. Prosedur dan Tekhnis Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu di Indonesia

Partai politik sebelum disahkan sebagai peserta pemilu, baik pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan wakil Presiden harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang dan sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Tahapan dalam penyelenggaraan Pemilu berdasarkan UU No 7 Tahun 2017 Pasal 167 ayat 4 Pelaksanaan Pemilu, meliputi:

1. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu

⁸⁶ *Ibid.* pasal 178 ayat 2

2. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih
3. Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu
4. Penetapan peserta pemilu
5. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan
6. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota
7. Masa kampanye
8. Masa tenang
9. Pemungutan dan penghitungan suara
10. Penetapan hasil pemilu
11. Pengucapan sumpah/ janji anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

Untuk menjadi peserta pemilu partai politik harus mengajukan pendaftaran melalui akses Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) untuk masyarakat dan menyerahkan dokumennya kepada KPU,⁸⁷ sekaligus harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh UU No 7 tahun 2017 pasal 173 ayat 2.

Persyaratan menjadi Parpol tersebut diantaranya;⁸⁸

- a. Berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang partai politik.
- b. Memiliki kepengurusan di seluruh provinsi.
- c. Memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi bersangkutan.

⁸⁷ PKPU No 6 tahun 2018 pasal 12 ayat (1)

⁸⁸ *Ibid.* Pasal 173 ayat 2

- d. Memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan.
- e. Menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat.
- f. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota.
- g. Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilu.
- h. Mengajukan nama, lambang, tanda gambar partai politik kepada KPU.
- i. Menyerahkan nomor rekening dana kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.

Dalam PKPU No 6 tahun 2018 pasal 12 ayat (4) dan (5), Partai politik mencetak formulir persyaratan pendaftaran dari Sipol setelah memasukan data kedalam Sipol yang dilakukan sebelum mendaftar sebagai calon peserta Pemilu ke KPU, untuk diserahkan kepada KPU pada saat pendaftaran (4), Partai politik yang tidak memasukan data salinan dokumen persyaratan ke dalam Sipol dan tidak menyerahkan salinan dokumen ke KPU, Parpol tersebut tidak dapat mendaftar sebagai Peserta Pemilu.

Pendaftaran Parpol sebagai peserta Pemilu Menurut UU No 7 tahun 2017 Pasal 176 diantaranya;

- 1) Partai politik dapat menjadi peserta Pemilu dengan mengajukan pendaftaran untuk menjadi calon peserta Pemilu kepada KPU.
- 2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dengan surat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau kepengurusan pusat.
- 3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dokumen persyaratan yang lengkap.
- 4) Jadwal waktu pendaftaran Partai Politik peserta Pemilu ditetapkan oleh KPU paling lambat 18 (delapan belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.

Dalam proses pendaftaran partai politik sebagai peserta pemilu kepada KPU dilakukan oleh pengurus partai di tingkat pusat, dengan menggunakan formulir MODEL F-PARPOL yang disediakan oleh KPU. Formulir pendaftaran untuk menjadi peserta pemilu tersebut ditandatangani oleh pimpinan partai politik tingkat pusat serta dibubuhi cap/stempel partai. Selain itu juga surat pendaftaran dilampiri dengan bukti pemenuhan syarat yang telah diatur dalam Undang-Undang dan peraturan KPU. Setelah itu berkas dan formulir tersebut diserahkan oleh pimpinan partai politik kepada KPU. Partai politik yang belum lengkap berkas-berkas pendaftarannya, dikembalikan kepada partai politik yang bersangkutan untuk diberikan kesempatan mendaftar kembali dalam jangka waktu pendaftaran yang telah ditetapkan oleh KPU.

Mengenai prosedur dan teknis proses penelitian dan/atau verifikasi diatur dalam **PKPU No 6 tahun 2018** tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik menjadi peserta pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota. Partai politik dapat menjadi calon peserta pemilu anggota DPR, dan DPRD dengan mengajukan pendaftaran kepada KPU, setelah lolos verifikasi dan disahkan menjadi badan hukum oleh Departemen hukum dan HAM, yang dilakukan oleh kepengurusan pimpinan partai politik tingkat pusat.

Untuk mengetahui mengenai keabsahan persyaratan-persyaratan tersebut ada proses penelitian dan verifikasi yang dilakukan oleh KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum.


Pelaksanaan verifikasi partai politik peserta pemilu di Indonesia, melalui dua tahapan yakni ;

1. Verifikasi Administratif
2. Verifikasi Faktual (penetapan keabsahan persyaratan).

Verifikasi Administratif adalah pemeriksaan terhadap bukti tertulis atau dokumen yang berkaitan erat dengan keabsahan pemenuhan persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu secara administratif sedangkan **Verifikasi faktual** adalah pemeriksaan dan pencocokan terhadap kebenaran bukti tertulis yang berkaitan erat dengan keabsahan pemenuhan persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu secara faktual. Penelitian partai politik yang dimaksud disini adalah penelitian pemenuhan syarat partai politik untuk menjadi calon peserta

pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam Peraturan KPU No 6 tahun 2018 Pasal 19 **Verifikasi administratif** pemenuhan syarat partai politik menjadi calon peserta pemilu yakni meliputi penelitian keabsahan:⁸⁹

- 
- a. Surat pendaftaran yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang dibubuhi cap basah Partai Politik sesuai dengan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang kepengurusan Partai Politik yang sah.
 - b. Salinan Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan Partai Politik terdaftar sebagai badan hukum, yang telah dilegalisir oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 - c. Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik di tingkat provinsi, Kabupaten/Kota dan kecamatan untuk meneliti pemenuhan syarat:
 1. Jumlah Kepengurusan paling sedikit di 75% (Tujuh puluh lima persen) dari jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.
 2. Jumlah kepengurusan paling sedikit di 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan.
 - d. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik tingkat pusat tentang susunan kepengurusan dan alamat kantor Partai Politik tingkat provinsi, Kabupaten/Kota dan kecamatan.

⁸⁹ Peraturan KPU No 6 tahun 2018 Pasal 19

- e. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik tingkat pusat yang menyatakan keterwakilan perempuan telah memenuhi jumlah paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) pada kepengurusan partai politik tingkat pusat, dan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota.
- f. Surat pernyataan memiliki nama anggota partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kabupaten/kota.
- g. Surat keterangan domisili kantor tetap dan alamat tetap dari camat atau sebutan lain/lurah/kepala desa atau sebutan lain yang dilampiri dan dokumen yang sah.
- h. Surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang dan tanda gambar partai politik dari Kementrian Hukum dan HAM.
- i. Salinan bukti nomor rekening atas nama Partai Politik tingkat pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota.
- j. Salinan AD dan ART Partai Politik,
- k. Nama, lambang atau tanda gambar Partai Politik.

Apabila dalam pelaksanaan penelitian administratif terhadap persyaratan di atas, ada partai politik yang tidak memenuhi persyaratan, partai politik yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk memperbaiki atau memenuhi persyaratan yang ditelah ditentukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (hari) setelah pemberitahuan secara tertulis dari KPU. Dan apabila berkas-berkas atau persyaratan yang belum lengkap, dilengkapi, setelah itu berkas dikembalikan lagi

kepada KPU untuk meneliti kembali terhadap perbaikan persyaratan yang diajukan oleh partai politik yang bersangkutan.

Verifikasi faktual, yang meliputi penelitian dan pengecekan kebenaran data mengenai:

- a. Jumlah dan susunan kepengurusan partai politik ditingkat provinsi berdasarkan surat keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat mengenai pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat provinsi dengan cara mendatangi kantor pengurus parpol untuk mencocokkan kebenaran dokumen dengan pengurus yang bersangkutan;
- b. Jumlah dan susunan kepengurusan partai politik di tingkat kabupaten/kota berdasarkan surat keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat mengenai pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat kabupaten/kota paling sedikit di $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan, apabila dalam perhitungan jumlah kabupaten/kota yang dikalikan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) terdapat angka pecahan 0,5, maka dibulatkan ke atas.
- c. Surat pernyataan keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat paling sedikit 30% (tiga puluh persen) yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik tingkat pusat, dengan cara mendatangi kantor pengurus parpol untuk mencocokkan kebenaran dokumen dengan pengurus yang bersangkutan;
- d. Jumlah anggota partai politik sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau $\frac{1}{1000}$ (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap

kepengurusan partai politik di kabupaten/kota, berdasarkan lampiran daftar nama anggota dan fotokopi kartu tanda anggota partai politik yang masih berlaku.

- e. Domisili kantor tetap dan alamat tetap serta dokumen pendukung yang sah, dengan cara mendatangi kantor pengurus parpol untuk mencocokkan domisili kantor dengan sertifikat hak milik/surat pinjam pakai/sewa/kontrak.

Pelaksanaan verifikasi faktual sebagaimana yang dimaksud di atas, huruf a dan huruf e dilakukan oleh KPU provinsi yang bersangkutan. Dan pelaksanaannya dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak pemberitahuan secara tertulis mengenai hasil penelitian administratif oleh KPU.

Untuk pelaksanaan verifikasi faktual sebagaimana yang dimaksud di atas, huruf b, huruf d, dan huruf e, dilakukan oleh KPU kabupaten/kota yang bersangkutan. Mengenai waktu pelaksanaannya, dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan secara tertulis mengenai hasil penelitian administratif oleh KPU.

Verifikasi faktual sebagaimana yang dimaksud di atas, huruf d, dilakukan dengan cara :

- a. KPU mengambil dan meneliti secara acak 10 % (sepuluh persen) dari seluruh nama anggota partai politik pada kepengurusan di kabupaten/kota yang berjumlah di atas 100 (seratus) orang anggota.

- 
- b. Dalam hal jumlah anggota partai politik pada kepengurusan di kabupaten/kota di bawah 100 (seratus) orang verifikasi faktual dilakukan tidak secara acak.
 - c. Apabila hasil penelitian terhadap nama anggota partai politik pada kepengurusan di kabupaten/kota sebagaimana yang dimaksud pada huruf a terdapat kesalahan, maka kepada partai politik yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk memperbaiki daftar nama anggotanya, paling lambat 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan oleh KPU kabupaten/kota.
 - d. KPU akan melakukan penelitian kembali terhadap daftar nama anggota yang sudah diperbaiki sebagaimana yang dimaksud pada huruf b dengan cara sebagaimana dimaksud pada ketentuan huruf a.
 - e. Apabila setelah dilakukan penelitian kembali masih terdapat kesalahan, maka partai politik tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat di kabupaten/kota yang bersangkutan.

Untuk pelaksanaan verifikasi mengenai pernyataan keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik ditingkat pusat yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik dilakukan oleh KPU. Pelaksanaan verifikasi tersebut dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak partai politik yang bersangkutan menyampaikan berkas pendaftaran yang dinyatakan secara lengkap.

Apabila hasil verifikasi tersebut ternyata tidak memenuhi syarat, maka partai politik yang bersangkutan diberi kesempatan untuk;

1. Memperbaiki paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan dari KPU.

2. Setelah itu hasil verifikasi dibuatkan berita acara. Berita acara yang dibuat oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota mengenai hasil verifikasi faktual disampaikan kepada KPU pusat.
3. Setelah KPU menerima berita acara dari KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota, KPU membuat berita acara rekapitulasi berdasarkan berita acara hasil verifikasi administratif dan verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/ kota. Berita acara Rekapitulasi yang telah dibuat oleh KPU, digunakan sebagai dasar untuk menetapkan partai politik peserta Pemilu.

Bagi Partai politik yang memenuhi persyaratan dan lolos proses penelitian dan atau verifikasi faktual, ditetapkan menjadi partai politik peserta pemilu dengan ketetapan KPU. Tetapi sebaliknya, bagi partai politik yang tidak memenuhi persyaratan tidak ditetapkan menjadi partai politik peserta pemilu dan kepadanya disampaikan pemberitahuan disertai alasannya. Setelah itu KPU mengumumkan secara luas hasil penelitian dan penetapannya.

Mekanisme pengambilan keputusan KPU, KPU provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan dalam **rapat pleno**. Menurut UU No 7 tahun 2017 pasal 41-42 dan pasal 45-47 diantaranya;

Pasal 41 ;

- 1) Jenis rapat pleno KPU, KPU provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas rapat pleno tertutup dan terbuka.
- 2) Pemilihan ketua KPU, KPU provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diputuskan melalui rapat pleno tertutup.

- 3) Rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilu dilakukan oleh KPU provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam rapat pleno terbuka.

Pasal 42 ;

- 1) Rapat pleno KPU sah jika dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota KPU yang dibuktikan dengan daftar hadir.
- 2) Keputusan rapat pleno KPU sah jika disetujui oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota KPU yang hadir.

Pasal 45 ;

- 1) Dalam hal tidak tercapai kuorum, khusus rapat pleno KPU provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk menetapkan hasil Pemilu ditunda paling lama 3 (tiga) jam.
- 2) Dalam hal rapat pleno telah ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap tidak tercapai kuorum, rapat pleno dilanjutkan tanpa memperhatikan kuorum.
- 3) Khusus rapat pleno KPU provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk menetapkan hasil Pemilu tidak dilakukan pemungutan suara.

Pasal 47 ayat (1)

- 1) Ketua wajib menandatangani penetapan hasil Pemilu yang diputuskan dalam rapat pleno dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja. Jika dalam waktu tersebut tidak ditandatangani dengan sendirinya hasil Pemilu dinyatakan sah dan berlaku.

Penetapan Partai Politik sebagai Peserta Pemilu menurut UU No 7 Tahun 2017 Pasal 179;

1. Partai politik calon Peserta Pemilu yang dinyatakan lulus proses penelitian atau verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 173 ayat (1) dan pasal 178 ditetapkan sebagai Peserta Pemilu oleh KPU.
2. Penetapan Partai Politik sebagai peserta Pemilu dalam sidang pleno KPU paling lambat dilakukan 14 (empat belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.
3. Penetapan nomor urut Parpol sebagai peserta Pemilu dilakukan secara undi dalam sidang pleno KPU yang terbuka dengan dihadiri wakil Parpol peserta Pemilu.
4. Hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diumumkan oleh KPU.

Penetapan Partai Politik menurut Peraturan KPU No 6 tahun 2018 Pasal 44 diantaranya,

1. KPU menuangkan hasil Verifikasi persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu ke dalam berita acara Penetapan Partai Politik peserta Pemilu dengan menggunakan formulir Model BA.TAP.KPU-PARPOL.
2. KPU menetapkan Parpol yang memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilu dengan Keputusan KPU.
3. Penetapan Parpol sebagai peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota oleh KPU yang dilakukan dalam rapat pleno terbuka.

4. KPU menyampaikan salinan berita acara penetapan Parpol peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
 - a. Pengurus Partai Politik melalui Petugas Penghubung Parpol tingkat pusat, dan
 - b. Bawaslu
5. KPU mengumumkan hasil Penetapan Partai Politik peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di kantor KPU, dan diumumkan melalui media elektronik media cetak, papan pengumuman dan laman KPU.

Pengawasan terhadap pelaksanaan verifikasi Partai Politik peserta Pemilu dilakukan oleh **Bawaslu (Badan Pengawasan Pemilu)**. Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu bersifat tetap dan bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu.

BAB IV

ANALISIS TUGAS DAN KEWENANGAN KPU DALAM MELAKUKAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DI INDONESIA MENURUT *FIQH SIYASAH*

A Tugas dan Kewenangan KPU dalam melakukan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu di Indonesia

Pemilihan umum merupakan salah satu bagian dari proses sekaligus hasil dari sebuah sistem demokrasi. Meski demokrasi secara substansial dengan nilai-nilai yang menjunjung tinggi keterbukaan, kebebasan dan hak asasi baru sepenuhnya dijalankan pasca runtuhnya kekuasaan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, Indonesia sendiri sebenarnya telah mengenal Pemilihan Umum pertama sejak tahun 1955 hingga yang terakhir pada 2014 lalu.

Partai politik mengusulkan peserta pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Presiden dan wakil Presiden di Indonesia sebagai institusi yang menampung aspirasi rakyat. Melalui Pemilihan Umum yang diselenggarakan oleh KPU sebagai panitia penyelenggara, merupakan media untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Rakyat bebas memilih pemimpinnya tanpa ada paksaan atau intervensi dari pihak mana pun.

KPU adalah, lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia yang bersifat nasional, mandiri dan tetap. Untuk melaksanakan pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota, serta Presiden dan wakil Presiden. KPU memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu di Indonesia

sebelum terselenggaranya proses Pemilihan umum, sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2017.

Proses penyelenggaraan verifikasi partai politik sangat rawan dengan proses-proses *money politic*. KPU diharapkan harus menjadi wasit yang berada ditengah yang tidak berat sebelah, sebab kalau itu terjadi semua sangat potensial kemudian memicu reaksi. Dalam proses penelitian dan verifikasi tersebut ada pengawasan yang dilakukan oleh lembaga yang bernama Bawaslu. Pelaksanaan tugas dan kewenangan verifikasi partai politik dilaksanakan paling lambat 9 bulan sebelum hari/tanggal pemungutan suara. Dengan tetap mengacu pada asas penyelenggaraan Pemilihan Umum yakni: mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, terbuka, proporsionalitas, professional, akuntabilitas, efisien, dan efektif.

Partai politik yang lulus verifikasi ditetapkan sebagai peserta Pemilu oleh KPU dan penetapannya sebagai peserta Pemilu dilakukan dalam sidang juga dengan penetapan nomor urut dilakukan secara undi pleno KPU, begitu dalam sidang pleno KPU yang terbuka dan di hadiri oleh wakili seluruh Partai Politik peserta Pemilu dan setelah itu diumumkan kepada publik.⁹⁰ Mekanisme pengambilan keputusan KPU didalam menjalankan tugas dan kewenangannya dilakukan dengan rapat pleno. Musyawarah dilakukan oleh KPU dalam sidang pleno untuk menetapkan partai politik peserta Pemilu beserta nomor urutnya.

Dengan adanya pemilihan umum yang diselenggarakan oleh KPU tersebut, diharapkan dapat menghasilkan wakil-wakil rakyat yang mampu mengerti mengenai aspirasi dari rakyat terutama dalam proses perumusan kebijakan publik

⁹⁰ UU No 7 Tahun 2017 Pasal 179

dengan adanya sistem pergiliran kekuasaan dan untuk memberikan kebebasan kepada rakyat untuk memilih siapa yang layak untuk menjadi pemimpinnya dan wakil-wakilnya di parlemen yang akan memperjuangkan aspirasi politiknya.

Prosedur dan Tekhnis Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Di Indonesia

KPU melaksanakan verifikasi partai politik bertujuan untuk melakukan penelitian keabsahan persyaratan partai politik untuk menjadi peserta Pemilu baik secara administratif atau faktual yang nantinya partai-partai tersebut akan mengusulkan pasangan calon Presiden dan wakil Presiden, anggota DPR, DPRD provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Proses penelitian atau verifikasi yang dilakukan oleh menteri hukum dan HAM bertujuan untuk menjadikan atau mengesahkan institusi partai politik menjadi badan hukum, dan setelah itu didaftarkan kepada KPU dengan prosedur dan teknis yang telah ditetapkan oleh KPU sendiri. Selanjutnya partai politik akan melalui proses penelitian dan atau verifikasi yang akan dilaksanakan oleh KPU untuk meneliti keabsahan atau kebenaran berkas yang diajukan oleh partai politik untuk menjadi peserta pemilu.

Penelitian dan atau Verifikasi partai politik calon peserta pemilu melalui dua tahapan, yakni: verifikasi administratif dan verifikasi faktual. verifikasi administratif berkenaan dengan persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu terkait mengenai pemeriksaan terhadap bukti tertulis yang berkaitan erat dengan keabsahan pemenuhan persyaratan partai politik menjadi peserta Pemilu secara administratif sedangkan verifikasi factual berkenaan dengan persyaratan partai politik menjadi peserta Pemilu yang berkaitan dengan pemeriksaan dan

pencocokan terhadap kebenaran bukti tertulis yang berkaitan erat dengan keabsahan persyaratan secara faktual.

Proses **verifikasi administratif** yang dilaksanakan oleh KPU yakni melakukan pemeriksaan terkait mengenai keabsahan persyaratan partai politik untuk menjadi calon peserta Pemilu yang meliputi fotokopi berita Negara republik Indonesia mengenai bukti bahwa partai politik tersebut berstatus badan hukum, surat pernyataan mengenai jumlah kepengurusan di tingkat provinsi dan Kabupaten, surat pernyataan keterwakilan perempuan, surat pernyataan mengenai jumlah anggota dan surat keterangan domisili kantor tetap serta nama dan tanda gambar partai politik yang diajukan oleh pimpinan partai politik di tingkat pusat kepada KPU.

Sedangkan mengenai **verifikasi faktual** adalah proses pencocokan keabsahan surat-surat pernyataan atau berkas-berkas yang diajukan oleh pimpinan partai tersebut di lapangan. Untuk penelitian jumlah anggota dilakukan dengan cara KPU mengambil dan meneliti secara acak 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah anggota partai politik pada kepengurusan di tingkat Kabupaten/Kota yang berjumlah di atas 100 (seratus) orang anggota secara *door to door* atau menanyakan langsung ke masyarakat. Di Indonesia dalam proses pemilihan kepala negara atau pemerintah, masyarakat dilibatkan secara langsung untuk menentukan siapa yang menjadi pemimpinnya, tidak terdapat intimidasi atau politik uang secara sistematis.

B. Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Tugas dan Kewenangan KPU dalam Memverifikasi Partai Politik Peserta Pemilu di Indonesia

Dengan tetap mengacu pada asas penyelenggaraan Pemilihan Umum yakni: mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, terbuka, proporsionalitas, professional, akuntabilitas, efisien, dan efektif. Asas-asas tersebut kalau dilihat sama seperti asas-asas universal yang direkomendasikan oleh Islam di dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam al-Qur'an Allah Swt memerintahkan kepada manusia untuk berlaku adil baik sebagai individu atau sebagai pemimpin umat apalagi sebagai pemimpin lembaga. Berlaku adil harus dilakukan tanpa pandang bulu, kedudukan dan latarbelakang partainya. Sebagaimana firman Allah Swt dalam .

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (QS. An Nahl : 90).*

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An nisa' : 58).*

Mekanisme pengambilan keputusan KPU didalam menjalankan tugas dan kewenangannya dilakukan dengan rapat pleno. Musyawarah dilakukan oleh KPU dalam sidang pleno untuk menetapkan partai politik peserta Pemilu beserta nomor urutnya. Ini sesuai dengan prinsip dalam Islam yang menganjurkan untuk memutuskan perkara umat melalui musyawarah seperti yang di contohkan oleh nabi Muhammad dan *khulafaurrasyidin*. Mengenai musyawarah, Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur'an dijelaskan pada surat As-Syura pada ayat 38.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya: Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.(QS. As Syura : 38)

Berdasarkan ayat di atas musyawarah merupakan bagian dari ajaran Islam yang harus diselenggarakan sebagai media untuk mengambil keputusan dalam memecahkan problem umat dan bangsa.

KPU melaksanakan verifikasi partai politik bertujuan untuk melakukan penelitian keabsahan persyaratan partai politik untuk menjadi peserta Pemilu baik secara administratif atau faktual. Melihat tugas dan kewenangan serta mekanisme pengambilan keputusan KPU tersebut, kalau dianalisis dengan praktek politik atau pemerintahan dalam sejarah pemerintahan Islam, kita akan menemukan lembaga *ahl al-halli wal-aqdi* atau *ahl al-syura* yang memiliki tugas untuk melakukan verifikasi dan menetapkan calon-calon pengganti *khalifah*. Seperti yang dilakukan oleh khalifah Umar bin Khattab sebelum wafatnya adalah membentuk team formatur atau majlis syura yang keanggotaannya ditentukan oleh khalifah sendiri

dan sifatnya sangat terbatas. Memiliki tugas untuk menjaring dan meneliti sekaligus menetapkan siapa yang layak untuk menjadi khalifah. Sebelum proses penetapan siapa yang layak menjadi *khalifah* lembaga tersebut melakukan musyawarah atau konsultasi setelah dilakukannya proses penelitian dan penjaringan aspirasi rakyat, dalam proses musyawarah tersebut suara mayoritas harus diikuti. baru setelah itu proses *bai'ah* dilakukan oleh perwakilan-perwakilan suku yang ada sebagai bentuk kesepakatan rakyat terhadap khalifah terpilih.

Lembaga *ahl al-halli wal-aqdi* atau *ahl al-syura* dalam sejarah pemerintahan Islam khususnya pada masa pemerintahan *khulafaurrasyidin* bisa disebut sebagai panitia penyelenggara Pemilihan umum yang memiliki keanggotaan sangat terbatas dan anggota-anggotanya tersebut menurut Imam Al-Mawardi harus memiliki sikap yang adil, memiliki ilmu pengetahuan yang memungkinkan mereka mengetahui siapa yang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai khalifah sekaligus memiliki wawasan yang luas dan kearifan yang memungkinkan mereka memilih siapa yang paling tepat untuk menjadi khalifah.

Berbeda dengan lembaga *ahl al-halli wal-aqdi* atau *ahl al-syura* yang ada pada masa pasca *Khulafaurrasyidin* yakni pemerintahan Bani Umayyah dan Abbasiyah lembaga tersebut hanya menjadi lembaga yang meligitimasi kebijakan-kebijakan khalifah seperti zaman Orde Baru (ORBA) di Indonesia dan menjadi tempat konsultasi *khalifah* sebelum mengumumkan putra mahkota sebagai calon pengganti *khalifah*.

Selain sebagai panitia penyelenggara pemilihan Khalifah lembaga *ahl al-halli wal-aqdi* atau *ahl al-syura* memiliki tugas dan kewenangan untuk memberikan masukan kepada khalifah, sebagai lembaga yang menampung aspirasi masyarakat, melakukan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, membuat undang-undang sekaligus mempunyai hak untuk membatasi jumlah kandidat yang akan menjadi pemimpin. Berdasarkan tugas dan kewenangan tersebut lembaga *ahl al-halli wal-aqdi* atau *ahl al-syura* disamakan dengan lembaga-lembaga negara modern hari ini seperti DPR, MPR dan DPD.

Kalau melihat salah satu tugas dan kewenangan lembaga *ahl al-halli wal-aqdi* atau *ahl al-syura* tersebut yakni membatasi jumlah kandidat yang akan menjadi khalifah sekaligus melakukan seleksi. Maka tugas tersebut sama dengan tugas KPU yang memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan verifikasi terhadap partai politik calon peserta pemilu yang nantinya akan melakukan seleksi terhadap partai-partai politik calon peserta Pemilu yang memiliki imbas atau dampak untuk membatasi jumlah partai politik yang akan ikut berkompetisi dalam Pemilihan umum.

Setelah proses pemilihan diselenggarakan baik yang diselenggarakan oleh lembaga *ahl al-halli wal-aqdi* atau KPU ada proses penetapan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut. Kalau lembaga *ahl al-halli wal-aqdi* melalui musyawarah dan setelah itu ada *bai'ah* umum yang dilakukan oleh masyarakat sebagai bentuk kesepakatan. Begitu juga dengan KPU penetapan dilakukan dalam musyawarah atau rapat pleno.

Partai politik sebagai institusi atau lembaga penyalur aspirasi rakyat keberadaannya dikenal jauh setelah kelahiran Islam. Tetapi kalau kita melihat setelah wafatnya nabi, pembicaraan mengenai penggantinya dilakukan di balai Syaqqifah bani Sa'idah yang pesertanya adalah orang-orang *Muhajirin* dan *Anshar* yang terdiri dari berbagai macam suku. Salah satu golongan umat Islam tersebut yakni golongan *Anshar* sebelum ditetapkannya Abu Bakar sebagai *khalifah* mereka sempat mengajukan calon *khalifah* sendiri dari golongannya.

Partai politik yang menjadi peserta Pemilu adalah institusi atau lembaga penampung aspirasi rakyat sekaligus sebagai alat untuk memperjuangkan cita-cita anggotanya atau kepentingan anggotanya. Dalam Islam, partai adalah sebuah sarana yang diperbolehkan secara *syar'i* yang intinya berkumpul dan beraktifitas dalam kebaikan secara kolektif. Karena partai politik yang ada bisa dijadikan sebagai media untuk memperjuangkan tegaknya keadilan bagi seluruh masyarakat.

Dilihat secara keseluruhan dengan Perspektif *fiqh siyasah* mengenai tugas dan kewenangan KPU di dalam melakukan verifikasi partai politik peserta pemilu tidak bertentangan dengan prinsip atau ajaran Islam yang mengedepankan musyawarah dan keadilan sekaligus transparansi dalam melaksanakan tugas, selain itu KPU bisa disamakan dengan lembaga *ahl al-halli wal-aqdi*. Di mana *ahl al-halli wal-aqdi* memiliki arti sebagai lembaga yang melonggarkan dan mengikat, yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama rakyat.

Dengan kata lain, *ahl al-halli wal-aqdi* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara rakyat. Sekaligus lembaga tersebut memiliki tugas untuk menyelenggarakan pemilihan *khalifah* setelah adanya proses verifikasi mengenai persyaratan untuk mengetahui pantas atau layak untuk menjadi pemimpin.

Prosedur dan Tekhnis Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu menurut *Fiqh Siyasah*

Kalau kita melihat pemilihan *khalifah khulafaurrasydin* dalam sejarah pemerintahan Islam, mereka dipilih melalui Pemilihan umum secara resmi seperti Abu Bakar dipilih dan di *bai'at*, Umar bin Khattab walaupun mendapat intruksi dari Abu Bakar, dia menduduki kursi khalifah bukan karena intruksi khalifah sebelumnya karena intruksi tersebut pada dasarnya hanya sebatas pencalonan dari Abu Bakar, tetapi yang menetapkan dan memilihnya adalah umat. Demikian juga dengan Usman, dia menjadi khalifah melalui proses musyawarah dan pemilihan dari umat. Pada waktu itu, Umar memilih enam sahabat untuk menggantikannya, yaitu: Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abdurrahman bin 'Auf, kecuali Abdurrahman bin 'Auf dia menyerahkan yang dipilihnya hanya Usman dan Ali. Abdurrahman bin 'Auf berkata "Berhari-hari saya tidak bisa memejamkan mata untuk tidur, saya bertanya kepada kaum muslimin, hingga saya pun menanyakan kaum wanita di rumah-rumah mereka, siapa yang akan mereka pilih? Akhirnya saya ketahui bahwa mereka menginginkan Usman".

Dalam kisah ini kita renungkan sejenak untuk dijadikan sebagai referensi hukum dalam perkataan Abdurrahman bin Auf tersebut. Di mana prosedur dan teknis untuk melakukan penelitian administratif dan atau verifikasi faktual terhadap partai politik peserta Pemilu harus dilakukan secara *door to door* atau langsung terjun ke lapangan dengan cara mewawancarai masyarakat untuk mengetahui keabsahan berkas yang diajukan oleh partai politik untuk menjadi peserta Pemilu.

Dalam perspektif *fiqh siyasah* mengenai prosedur dan teknis verifikasi partai politik peserta pemilu di Indonesia sama dengan cara-cara yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf ketika melakukan penjangkaran aspirasi rakyat untuk menentukan siapa yang layak untuk menjadi pengganti Umar bin Khatab apakah Ali bin Abi Thalib atau Usman bin Affan, yang pada akhirnya lembaga *ahl al-halli wal-aqdi* di dalam musyawarahnya memutuskan Usman bin Affan yang menjadi khalifah pengganti Umar bin Khatab sekaligus proses verifikasi tersebut tidak bertentangan dengan prinsip atau ajaran Islam.

Jadi mengenai prosedur dan teknis penelitian dan verifikasi tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam karena proses tersebut merupakan usaha untuk mengetahui kebenaran yang diajukan oleh lembaga kepada lembaga, sehingga lembaga yang berwenang untuk memutuskan bisa memberikan keputusan secara obyektif dan adil.

BAB V PENUTUP

A Kesimpulan

Dari bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut UU No 7 Tahun 2017, Komisi Pemilihan Umum sebelum pelaksanaan Pemilu bertugas dan berwenang untuk melakukan verifikasi terhadap partai politik calon peserta pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota serta calon Presiden dan calon wakil Presiden.

Menurut Peraturan KPU No 6 tahun 2018 Pasal 19 Prosedur dan Teknis proses penelitian dan atau verifikasi partai politik menjadi peserta pemilu melalui dua tahapan yakni:

- a. Verifikasi administratif, berkenaan dengan persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu adalah pemeriksaan terhadap bukti tertulis yang berkaitan erat dengan keabsahan pemenuhan persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu secara administratif.
 - b. Verifikasi faktual, berkenaan dengan persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu adalah pemeriksaan dan pencocokan terhadap kebenaran bukti tertulis yang berkaitan erat dengan keabsahan pemenuhan persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu secara faktual.
2. Tugas dan kewenangan KPU dalam melakukan verifikasi partai politik peserta pemilu di Indonesia, dalam perspektif *fiqh siyasah*, tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang mengedepankan musyawarah, keadilan dan persamaan. Karena KPU dalam melakukan verifikasi dan

menetapkan partai politik peserta pemilu di Indonesia, berdasarkan pada keputusan bersama yang dilakukan dalam rapat pleno KPU.

B Saran

Dalam rangka untuk memperkaya khazanah intelektualitas akademisi dan masyarakat secara luas mengenai wacana politik dan kelembagaan yang ada dalam pemerintahan Islam, perlu ditingkatkan kegiatan-kegiatan penelitian dan diskusi sebagai media untuk mentransformasikan wawasan pemikiran politik Islam dan sejarah pemerintahan umat Islam baik dari kepemimpinan nabi hingga dinasti-dinasti Islam yang jauh setelah nabi.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Rozali, *Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas*, (Jakarta : Raja Grafindo persada, 2009)
- Al-Mawardi Imam, *Al Ahkam As-Sulthaniyyah “Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*, (Jakarta : PT Darul Falah, 2006)
- Al Maududi – Abu A’la, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, (Bandung : Mizan, 1995)
- Al Maududi – Abu A’la, *Khilâfah wa al-Mulk*, terj. M.Baqir “Khilafah dan Kerajaan”, (Bandung : Mizan, 1984)
- Arifin Anwar, *Politik Pencitraan-Pencitraan Politik*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2014)
- Arikunto Suharsimi, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung : Tarsito, 1996)
- Abegebriel Maftuh A, *Negara Tuhan the Thematic Encyclopaedia*, (Jakarta : SR-ins Team, 2004)
- Asikin Zainal, Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Balai Pustaka, 2006)
- Budiarjo Miriam, “*Dasar-Dasar Ilmu Politik*”, (Jakarta: PT. Gramedia, 1989)
- Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta, 1990).
- Djazuli, *Fiqh Siyasah “Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah”*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2003)
- Gatara Said A.A., *Sosiologi politik, “Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian”*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007)
- Hadi Sutrisno, *Metode Research* (Yogyakarta : Andy Offset. 1997)
- Hadiwijoyo Sakti Suryo, *Negara, Demokrasi, dan Civil Society*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2012)
- Haryanto, *Partai Politik Suatu Tinjauan Hukum*, (Yogyakarta : LIBERTY, 1984)
- Hasbi Artani, *Musyawaharah dan Demokrasi “Analisis Konseptual Aplikatif Dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Politik Islam”* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001)
- Hasbi M, Airudin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, (Yogyakarta : UII Press, 2000)
- Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Prenada Media Group, 2014)
- Jaelani Kadir Abdul, *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam*, (Semarang : Bina Ilmu, 1995)
- Karim Abdul, *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam* (Yogyakarta:Bagaskara, 2012)
- Kholiq Abdul Farid, *Fikih Politik Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005)

- Karsayuda M.Rifqinizamy, *Partai Politik Lokal Untuk Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015)
- Muhammad Kadir Abdul, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2004)
- Muhammad Kadir Abdul, *Hukum dan Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1998)
- Mamudji Sri dan, Soekanto Soerjono *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009)
- Maarif Syafii Ahmad, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, (Jakarata: Mizan, 1995)
- Nawawi Hadari, *Kepemimpinan Menurut Islam*, (Yogyakarta : Gadjah Mada, 1993)
- Nurtjahjo Hendra, *Filsafat Demokrasi*, (Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2006)
- Prihatmoko J Joko, *Mendemostrasikan Pemilu, "Dari Sistem sampai Elemen Teknis"*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008)
- Rosyada Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial: Dirasah Islamiyah III*, (Jakarta : Rajawali Grafindo Persada, 1994)
- Seran Goris Gotfridus, *Kamus Pemilu Populer*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2003)
- Siradjuddin, *Politik Ketatanegaraan Islam (Studi Pemikiran A.Hasjmy)*, cet.1 (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007)
- Sjadzali Munawir, *Islam dan Tata Negara" Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta : UI Press, 1993)
- Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015)
- Suswanto Gunawan, *Mengawal Penegak Demokrasi" Dibalik Tata Kelola Bawaslu Dan DKPP"* (Jakarta : Erlangga, 2016)
- Syafiie Kencana Inu, *Ilmu Politik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010)
- Ubaedillah A., *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta : Kencana Prenada media Group, 2003)
- Yatim Badri, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta : Rajawali Press, 2010)
- Zaidan Karim Abdul, *Pemilu dan Parpol dalam Perspektif Syari'ah Sebuah Kajian Kritis dan Komprehensif Tentang Hukum Pemilu dan Berpartai*, (Bandung : PT.Syamsil Cipta Midia, 2003)
- Zada Khamami dan Syarif Ibnu Mular, *Fiqh Siyasah, Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta : Erlangga, 2008)

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Komisi_Pemilihan_Umum, diakses pada tanggal 2 Juni 2018 Pukul 08.35 WIB.

Jurnal *Politik Profetik* Vol.3, No 1 tahun 2004

Jurnal *Al- 'Adalah* Vol.XII, No.2 Desember 2014

Peraturan KPU No 6 tahun 2018

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang *Partai Politik*

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang *Pemilu Umum DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden*

Undang-Undang Nomor. 22 tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan KPU

Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2012, *Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD*, (Yogyakarta : PT Hafarima, 2012)

